

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



Oleh :

ALIVIA SALMA DIVA

NIM. 19.52.21.298

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA
TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:

ALIVIA SALMA DIVA
NIM. 19.52.21.298

Surakarta, 24 Mei 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmavati. S.E.I.,M.Si

NIP. 19841008 201403 2005

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ALIVIA SALMA DIVA

NIM : 195221298

PRODI : AKUNTANSI SYARIAH

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti / dilakukan sebelumnya. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023



Alivia Salma Diva

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIVIA SALMA DIVA
NIM : 195221298
PRODI : AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Tengah”**.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan mengambil data dari website pemerintah daerah dan link lainnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi yang sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023



Alivia Salma Diva

Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Alivia Salma Diva

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Alivia Salma Diva NIM: 195221298 yang berjudul:

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN *LEVERAGE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah. Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si
NIP. 19841008 201403 2005

PENGESAHAN

PENGARUIH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN,
UKURAN PEMERINTAH DAERAH, DAN *LEVERAGE* TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh:

ALIVIA SALMA DIVA
NIM. 19.52.21.298

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 M / 16 Dzulqa'dah 1444 H dan dinyatakan
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dewan Penguji:

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)
Frank Aligarh, S.Pd., M.Sc.
NIP. 19920912 201903 1 011



Penguji II
Aryani Intan Endah Rahmawati, S.E., M.Sc.
NIP. 19930521 201903 2 012




Penguji III
Marita Kusuma Wardani, S.E., M.Si., Ak., C.A
NIP. 19740302 200003 2 003



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta




Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah 2:286)

Semua sudah Allah atur, jangan takut gagal, Allah sangat bisa memudahkan segala urusan secara tiba-tiba.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,

Saya persembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, yang selalu memberikan perhatian, dukungan dan kasih sayang serta doa yang tidak pernah ada hentinya.
2. Teman dan sahabatku tersayang yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis.
3. Ibu Anim Rahmayati S.E.I., M.Si, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
4. Teman-teman Akuntansi Syariah H angkatan 2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Khairul Imam, S.H.I M.S.I selaku Ketua Jurusan Manajemen Bisnis Syariah dan Akuntansi Syaria Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Fitri Laela Wijayati, S.E., M.Si selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Ibu Devi Narulitasari, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Ibu Anim Rahmayati, S.E.I., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu, dukungan dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Badarudin dan Ibu Wiwik Handayani, terimakasih untuk segala doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya dalam segala hal untuk penulis.
9. Adik laki-laki saya Putra Fajar Wicaksono yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas segala dukungan, nasihat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat dan teman-temanku (Ajeng, Shinta, Vina, Fara, Luluk, Rika, Arum, Innayah) yang selalu membantu dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2019 Akuntansi Syariah H terimakasih atas segala kebersamaan selama perkuliahan ini.
13. Serta seluruh pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, untuk semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Mei 2023

Alivia Salma Diva

ABSTRACT

This study aims to determine the effect local own revenue, balance funds, local government size and leverage on regional financial performance.

This study use a quantitative research with a secondary data source in the form of the 2017-2021 Regional Government Financial Report of Central Java Province. The sampling technique used purposive sampling so that a sample of 165 data was obtained. The power analysis technique used is Panel Data Regression Analysis with Eviews 10.

The result showed that the local own revenue variable had a positive effect on local government financial performance, that balance funds variable and local government size had a negative effect on local government financial performance, while the leverage variable had no effect on local government financial performance.

Keywords : *local own revenue, balance fund, size of local government, leverage, regional financial performance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sehingga didapat sampel 165 data. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews 10.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, *leverage*, kinerja keuangan daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	.iii
SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	.iv
HALAMA NOTA DINASv
HALAMAN PENGESEHANvi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Rumusan Masalah.....	15
1.4 Tujuan Penelitian	16
1.5 Batasan Penelitian.....	16
1.6 Manfaat Penelitian	17
1.7 Jadwal Penelitian	17
1.8 Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
2.1 Kajian Teori	19
2.1.1 Teori <i>Stewardship</i>	19
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	20
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	24
2.1.4 Dana Perimbangan.....	26
2.1.5 Ukuran Pemerintah (<i>Size</i>)	29
2.1.6 <i>Leverage</i>	29
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan	30
2.3 Kerangka Berpikir.....	36

2.4	Hipotesis Penelitian	37
2.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	37
2.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	38
2.4.3	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	39
2.4.4	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Waktu dan Wilayah Penelitian	42
3.2	Jenis Penelitian	42
3.3	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	43
3.3.1	Populasi.....	43
3.3.2	Sampel	43
3.3.3	Teknik Pengambilan Sampel	43
3.4	Data dan Sumber Data	44
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6	Variabel Penelitian.....	45
3.6.1	Variabel Dependen	45
3.6.2	Variabel Independen	45
3.7	Definisi Operasional Variabel	46
3.8	Teknik Analisis Data	48
3.8.1	Statistik Deskriptif	49
3.8.2	Estimasi Model Regresi Data Panel.....	49
3.8.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel	50
3.8.5	Analisis Model Regresi Data Panel	53
3.8.6	Uji Ketepatan Model.....	54
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		56
4.1	Gambaran Umum Penelitian.....	56
4.2	Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	57
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	57
4.2.2	Pengujian Model Regresi Data Panel	59
4.2.3	Pengujian Kesesuaian Model Regresi Data Panel	62
4.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.2.5	Analisis Uji Regresi Data Panel.....	68
4.2.6	Uji Ketepatan Model.....	71
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	76
4.3.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	76
4.3.2	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	77
4.3.3	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (<i>Size</i>) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	79

4.3.4	Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	81
BAB V PENUTUP.....		84
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	84
5.3	Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA		86
LAMPIRAN.....		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi APBD Jawa Tengah 2019-2021 (Miliar Rp).....	8
Tabel 2 1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah	23
Tabel 3 1 Kronologi Pemilihan sampel.....	44
Tabel 3 2 Definisi Operasional Variabel.....	46
Tabel 3 3 Tabel Keputusan Durbin-Watson	53
Tabel 4 1 Analisis Statistik Deskriptif	57
Tabel 4 2 Hasil Regresi Model CEM.....	60
Tabel 4 3 Hasil Regresi Model FEM	61
Tabel 4 4 Hasil Regresi Model REM.....	62
Tabel 4 5 Hasil Uji Chow.....	63
Tabel 4 6 Hasil Uji Hausman	64
Tabel 4 7 Hasil Uji Normalitas	65
Tabel 4 8 Hasil Uji Multikolonieritas	66
Tabel 4 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4 10 Hasil Uji Autokorelasi	68
Tabel 4 11 Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model	69
Tabel 4 12 Hasil Uji F.....	72
Tabel 4 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4 14 Hasil uji Hipotesis	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Berpikir	36
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	93
Lampiran 2 Daftar Pemerintah Daerah	95
Lampiran 3 PAD sebelum dan sesudah di LN	96
Lampiran 4 Data dana perimbangan sebelum dan sesudah di LN	101
Lampiran 5 total aset sebelum dan sesudah di LN.....	106
Lampiran 6 data perhitungan leverage	111
Lampiran 7 data perhitungan rasio kemandirian.....	116
Lampiran 8 Tabulasi data siap olah	121
Lampiran 9 Hasil uji analisis statistik deskriptif.....	126
Lampiran 10 Hasil uji model regresi.....	127
Lampiran 11 Hasil uji kesesuaian model	130
Lampiran 12 Hasil uji asumsi klasik.....	131
Lampiran 13 Hasil uji ketepatan model	133

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah telah dilaksanakan selama 20 tahun. Otonomi daerah dimulai sejak adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999 kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Adanya Undang-Undang tersebut mengubah sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem terpusat atau sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau otonomi daerah (Priyono, dkk 2020).

Desentralisasi mempunyai dua keunggulan yaitu: mendorong partisipasi masyarakat, inisiatif dan kreatifitas dalam pembangunan dan peningkatan pemerataan dalam pembangunan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Meningkatkan alokasi sumber daya produktif dengan mengalihkan peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dan lebih informatif (Mardiasmo, 2009:25).

Otonomi daerah memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah mereka sendiri. Otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan rencana keuangannya sendiri. Oleh karena itu, penerapan otonomi

daerah memerlukan sistem desentralisasi yang terbuka, efektif, efisien dan akuntabel kepada masyarakat (Putri & Darmayanti, 2019)

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan, karena pemerintah pusat berharap dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara lebih mandiri, sehingga proses pembangunan dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat (Antari & Sedana, 2018).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan suatu daerah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Kinerja Keuangan Daerah yaitu kemampuan suatu daerah untuk menjalankan perekonomian yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembangunan daerah serta penyelenggaraan layanan kepada masyarakat (Permatasari & Trisnaningsih, 2022).

Penilaian kinerja pada sektor publik dapat diukur secara finansial dan non finansial. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik pada aspek finansial adalah dengan analisis rasio keuangan. Pada instansi pemerintah, penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan pada pemerintah daerah berupa laporan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Novia & Kartim 2019).

Hasil perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada laporan APBD dapat digunakan sebagai pedoman untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dari perspektif pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diamanatkan tugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pada kinerja keuangannya (Fathah, 2017).

Kinerja keuangan merupakan suatu pengukuran yang dapat digunakan untuk memastikan aturan keuangan dilaksanakan secara baik dan benar serta mampu mempertahankan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Penilaian yang tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sebelum pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di suatu daerah. Peningkatan kinerja keuangan daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian dalam suatu daerah (Nurhayati & Hamzah 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Menurut Puspita, (2018) rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan daerah untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahan daerahnya serta meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak dan retribusi oleh masyarakat kepada pemerintah daerah.

Kemandirian daerah merupakan tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kemandirian tersebut meliputi keuangan pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaannya sendiri, sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Bahwa setiap daerah memiliki sumber daya alam, kemampuan dan penghasilan yang berbeda-beda

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain PAD yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Lathifa & Haryanto, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan daerah sesuai dengan keinginan dan inisiatif pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan pemerintah daerah selama kurun waktu tertentu (Matande, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pendanaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Selain itu,

semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat menjadi rendah (Matande, 2019).

Pemerintah daerah dapat menghasilkan jumlah pendapatan daerah yang besar jika memiliki jumlah kas yang cukup untuk membiayai program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga akan tercapai kinerja keuangan yang baik (Rahareng & Saleh 2022)

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan juga termasuk dalam sumber penerimaan daerah yang berkontribusi signifikan terhadap APBD. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) sebagai bentuk komitmen antara pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Adinata & Efendi, 2022).

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah untuk penerapan desentralisasi. Dana perimbangan ini diberikan kepada daerah karena setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi daerah yang berbeda dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin besar dana perimbangan yang diterima maka akan membuktikan bahwa semakin kuat ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya (Budiana & Rahayu, 2021).

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu variabel pengukuran besar atau kecilnya suatu daerah yang dapat diukur dengan total aset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktivitas. Ukuran pemerintah dapat diproksikan sebagai total aset yang dimiliki dan akan berdampak pada kinerja keuangan daerah (Mulyani & Wibowo, 2017).

Ukuran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Apabila suatu daerah mempunyai aset yang besar, maka besar pula peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya daerah. Dengan aset yang besar, pemerintah daerah juga dituntut lebih akuntabilitas sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Ernawati & Jaeni 2018).

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur ketergantungan suatu daerah pada kreditur untuk membiayai asetnya. Daerah dengan tingkat *leverage* tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman eksternal untuk membiayai asetnya. Dalam pemerintah daerah, perhitungan rasio *leverage* penting dilakukan oleh seorang kreditor dan calon kreditor untuk membuat ketentuan dalam pemberian pinjaman. *Leverage* akan digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya (Sari, 2016).

Leverage yang diterapkan pada pemerintah daerah tidak dapat disamakan dengan keadaan pada suatu perusahaan, karena pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang namun juga berasal dari dana bantuan

pemerintah pusat (Novia & Kartim, 2019). *Leverage* dianggap berpengaruh terhadap kinerja keuangan, karena semakin tinggi *leverage* akan semakin tinggi ketergantungan pada pihak luar, sehingga besar hutang yang dimiliki akan membuat kinerja keuangan menjadi rendah (Ernawati & Jaeni, 2018).

Adanya otonomi daerah harus dibarengi dengan meningkatnya efisiensi dan tanggung jawab pemerintah daerah agar tercapai tujuan penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah tersebut dikatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan daerahnya sendiri, dengan harapan bahwa pemerintah daerah lebih memahami mengenai kepentingan, peluang, dan keinginan masyarakatnya dari pada pemerintah pusat (Nauw & Riharjo 2021).

Pendapatan asli daerah dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila dapat membiayai kebutuhannya sendiri dalam artian sebagian besar belanja daerah harus dibiayai oleh pemerintah daerah bukan dari pemerintah pusat. PAD diperoleh dari pajak, retribusi daerah dan penghasilan lain-lain yang sah. Dana perimbangan hanya sebagai pendukung dalam kegiatan pemerintahan. Namun demikian, masih banyak permasalahan terkait dengan desentralisasi fiskal sehingga meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (Saputra & Fernando 2017).

Indonesia telah menerapkan otonomi daerah sejak tahun 2001, namun belum terdapat tanda-tanda keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah karena banyaknya daerah yang masih bergantung pada pemerintah pusat. Terlihat dari data Realisasi APBD Jawa Tengah tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1 1
Realisasi APBD Jawa Tengah 2019-2021 (miliar Rp)

I-Account	2019	2020	2021	GROWTH
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
Pendapatan daerah	106.023	102.602	103.780	1,15%
PAD	28.648	28.056	29.538	6,71%
Pendapatan Transfer	67.543	64.928	71.021	9,38%
Lain-lain pendapatan yang sah	9.832	9.618	2.821	-70,67%

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu cermin kemandirian daerah dapat dilihat dari sumber pendapatan, dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pendapatan di Jawa Tengah terealisasi sebesar Rp 103.780 miliar. Proporsi pendapatan daerah masih didominasi dari pendapatan transfer yang tumbuh 9,38% kemudian diikuti dengan pendapatan asli daerah sebesar 6,71%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terkontraksi sangat signifikan sebesar 70,67% dibanding tahun lalu (djpk.kemenkeu.go.id).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah masih di dominasi oleh pendapatan transfer, sehingga Provinsi Jawa Tengah belum bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri. Karena pendapatan asli daerah merupakan cerminan bentuk kemandirian suatu daerah dalam melaksanakan

otonomi daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka tingkat kemandiriannya semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat menjadi menurun (Amin, 2015).

Tingkat ketergantungan Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah pusat bisa dikatakan tergolong tinggi. Untuk mengukur tingkat kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan rasio ketergantungan daerah. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian maka daerah tersebut memiliki ketergantungan yang rendah. Hal tersebut menandakan bahwa daerah telah mampu mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Berikut pengelompokan ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021.

Tabel 1 1
Pengelompokan Ketergantungan Daerah di Jawa Tengah

Rasio Ketergantungan	Tingkat ketergantungan	Nama Kabupaten/Kota
0-25	Sangat Rendah	-
25-50	Rendah	Kota Semarang
50-75	Sedang	Kab. Banyumas, Kab Boyolali, Kab Brebes, Kab Cilacap, Kab Demak, Kab Jepara, Kab Karanganyar, Kab Kendal, Kab Kudus, Kab Pati, Kab Pemalang, Kab Rembang, Kab Semarang, Kab Sragen, Kab Sukoharjo, Kab Tegal, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Tegal.
75-100	Tinggi	Kab Banjarnegara, Kab Batang, Kab Blora, Kab Grobogan, Kab Kebumen, Kab Klaten, Kab Magelang, Kab Kebumen, Kab Pekalongan, Kab Purbalingga, Kab Purworejo, Kab Temanggung, Kab Wonogiri, Kab Wonosobo.

Sumber:djpk.kemenkeu.go.id

Hasil Perhitungan rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2019-2021. Kota Semarang merupakan daerah dengan angka rasio ketergantungan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi sehingga memiliki rasio ketergantungan keuangan yang rendah. Sebanyak 21 atau 60% Kabupaten Kota di Jawa Tengah memiliki tingkat ketergantungan keuangan dalam kategori sedang dan sebanyak 13 atau 37,14% memiliki tingkat ketergantungan keuangan daerah yang tinggi (djpk.kemenkeu.go.id).

Pemerintah daerah harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Tetapi sampai saat ini belum tergalinya pendapatan daerah pada umumnya yang disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang rendah serta lemahnya sistem hukum dan administasi pendapatan daerah (Kemenkeu, 2021).

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang kinerja keuangan daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani, (2012) menunjukkan hasil bahwa *size*, kemakmuran, ukuran legislatif dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Secara parsial variabel *size* dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan kemakmuran dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Natoen dkk., (2017) menunjukkan hasil bahwa *population, size, wealth* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyyah dkk., (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue, size, leverage* dan klaster kemampuan keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan secara parsial variabel opini audit, ukuran legislatif, *size, leverage* dan klaster kemampuan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Saraswati & Rioni (2019), pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan ukuran pemerintah daerah dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian Prastiwi & Aji, (2020) menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian Nurhayati & Hamzah, (2020) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi dan ukuran

pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan Putri & Amanah, (2020) menunjukkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian Andjarwati dkk, (2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah, sedangkan untuk dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Nauw, (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulina dkk., (2021) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan ukuran pemerintah dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian Dessy & Junita, (2022) pendapatan asli daerah, *leverage*, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian Ardedia dkk., (2022) pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Penelitian yang

dilakukan Adinata & Efendi, (2022) menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari Penelitian Andjarwati dkk. (2021) dengan judul “*Analysis Of Local Own Revenue and Balancing Funds On The Financial Performance Of DisRICTS and Cities In The Region Of East Java Province*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menambahkan dua variabel independen yakni variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) dan variabel *leverage* berdasarkan penelitian dari Ilmiyah dkk, (2017).

Selain itu, penelitian ini dilakukan karena adanya riset gap dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Andjarwati dkk. (2021), Prastiwi dan Aji, (2020), Maulina, Alkamal, & Fahira, (2021), Putri & Amanah, (2020), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah & Maria, (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan kemandirian daerah.

Selain pendapatan asli daerah ada dana perimbangan yang berasal dari APBN, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Penelitian mengenai dana perimbangan yang dilakukan Andjarwati dkk., (2021) dan penelitian Prastiwi & Aji, (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tetapi, berbeda dengan hasil penelitian dari Maulina dkk., (2021) dan Ardelia dkk., (2022)

yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian mengenai ukuran pemerintah daerah yang dilakukan Adinata & Efendi, (2022) dan Nurhayati & Hamzah, (2020) hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni, (2019), dan Maulina dkk., (2021), yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Leverage yang kian tinggi bisa disebut kinerja keuangan memburuk. Dengan begitu daerah belum bisa mendanai operasional mereka sehingga memerlukan pinjaman dari pihak lain. Hasil penelitian mengenai *leverage* yang dilakukan oleh Banunaek dkk., (2022) dan Adinata & Efendi, (2022), hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Tetapi hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Saraswati & Rioni, (2019), Ilmiyyah dkk., (2017) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya maka identifikasi masalah yang akan diteliti adalah:

1. Pendapatan daerah masih di dominasi oleh pendapatan transfer sehingga Provinsi Jawa Tengah belum bisa dikatakan sebagai daerah yang mandiri.
2. Masih terdapat kabupaten/kota yang memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi dan hanya kota Semarang yang memiliki tingkat ketergantungan rendah.
3. Rendahnya usaha pemerintah dalam melakukan penggalian dan optimalisasi Pendapatan Asli daerah serta pemungutan potensi Pendapatan Asli Daerah.
4. Adanya perbedaan hasil penelitian yang terdahulu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal diatas maka identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah
2. Menguji secara empiris pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah
3. Menguji secara empiris pengaruh ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan daerah
4. Menguji secara empiris pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Melihat luasnya permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diperlukan adanya pembatasan masalah dengan tujuan agar penelitian tetap terfokus. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah dan *leverage* terhadap kinerja keuangan daerah.
2. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk referensi dalam melakukan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah di Indonesia, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah masing-masing daerah.

1.7 Jadwal Penelitian

Terlampir.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah mengenai kinerja keuangan daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan leverage dengan berbagai fenomena yang ada. Dalam bab ini dipaparkan mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan untuk mempermudah membaca skripsi ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan, serta menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dijelaskan pula mengenai penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis penelitian, waktu penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel penelitian, data dan sumber data yang digunakan, variabel penelitian, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya serta uraian hasil yang dikaitkan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis keterbatasan penelitian dan saran-saran yang diperuntukkan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson & Davis, (1991) teori *Stewardship* menggambarkan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih mementingkan tujuan utama yaitu kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang dirancang dimana para manajer sebagai *steward* berusaha mencapai tujuan organisasinya (Sanjaya, 2017).

Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada hakikatnya manusia dapat dipercaya, mampu berbuat dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran pada pihak lain. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi pemerintah dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas principal dan manajemen. Teori *stewardship* dapat digunakan pada penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan profit lainnya (Mustiani & Effendy 2022).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang terpercaya dan menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi pihak publik, dan dapat mempertanggung jawabkan keuangan yang dipercayakan

kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai maksimal. Apabila tujuan tersebut berhasil dijalankan dengan baik oleh pemerintah maka masyarakat akan merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah (Ernawati & Jaeni 2018).

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian dalam melaksanakan tugas atau program yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan sumber pendapatan, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan dengan mengandalkan sumber daya yang ada (Irene & Siregar, 2020).

Menurut Fahmi, (2012: 2) kinerja keuangan yaitu hasil dari penilaian analisis yang dilakukan untuk menentukan sejauh mana suatu organisasi telah melakukan aktivitasnya dengan benar dan akurat sesuai dengan peraturan keuangan. Menurut Halim, (2007: 24) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan indikator yang digunakan untuk memastikan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa suatu daerah mampu menjalankan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan optimal untuk mempertahankan tingkat layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di daerah (Saraswati & Rioni, 2019).

Berdasarkan dengan beberapa pengertian tersebut, kesimpulan yang diperoleh yaitu kinerja keuangan merupakan hasil dari suatu program atau kegiatan yang telah dicapai berkaitan dengan penyelenggaraan keuangan daerah dengan menggunakan anggaran yang terukur kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan program yang telah direncanakan (Azhar, 2021).

Kinerja keuangan merupakan salah satu hal yang penting baik untuk pemerintah daerah maupun pihak eksternal. Indikator kinerja keuangan yang diperoleh dari data keuangan yang terukur berdasarkan anggaran yang telah disusun, dapat menjadi acuan untuk perbaikan program lebih lanjut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas (Sari, 2016).

Menurut Mardiasmo, (2009: 121) pengukuran kinerja pada sektor publik (instansi pemerintah daerah) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer publik dalam mengevaluasi pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja dapat didasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut menganalisis selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah daerah
- 2) Mendukung pengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan
- 3) Mencapai akuntabilitas publik dan meningkatkan hubungan dalam organisasi.

Menurut Halim, (2007) pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan wajib menyerahkan laporan tanggung jawab keuangan daerahnya untuk dinilai apakah

pemerintah daerah berhasil memenuhi kewajibannya dengan baik atau tidak. Salah satu alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

Analisis rasio keuangan terhadap pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur laporan keuangan selama periode waktu tertentu untuk mengidentifikasi kecenderungan yang terjadi. Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan perhitungan rasio keuangan yang merupakan indikator kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya oleh (Andjarwati dkk, 2021) yang menggunakan rasio kemandirian untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat kemampuan keuangan daerah untuk mengelola kegiatan pemerintahan daerahnya sendiri untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai imbalan atas pembayaran pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah daerah (Puspita, 2018).

Menurut Mahmudi, (2016: 140) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan total penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah total pendapatan daerah. Semakin tinggi angka rasio kemandirian menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi mandiri dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari luar. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti semakin besar pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Tabel 2 1
Pola Hubungan Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

No	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
1	0-25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	>25-50%	Rendah	Konsultif
3	>50-75%	Sedang	Partisipatif
4	>75%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Pola hubungan tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola hubungan Instruktif, yaitu peran pemerintah pusat lebih mendominasi atas kemandirian pemerintah daerah itu sendiri.
2. Pola hubungan Konsultif, yakni pemerintah daerah sedikit mampu menjalankan otonomi daerah dan peran pemerintah pusat sudah sedikit berkurang.
3. Pola hubungan Partisipatif, yakni peran pemerintah sudah mulai menurun, dan pemerintah daerah sudah mampu meningkatkan kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
4. Pola hubungan Delegatif yaitu, pemerintah pusat sudah tidak ikut campur karena pemerintah daerah dianggap sudah mandiri melaksanakan otonomi daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah sumber pendapatan daerah untuk mendanai pembangunan dan upaya daerah untuk meminimalisir tingkat kebergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah yaitu seluruh pendapatan yang berasal dari ekonomi asli daerah (Prastiwi & Aji, 2020).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Potensi masing-masing daerah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian daerah (Andjarwati dkk, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk menunjang pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur. Pendapatan asli daerah juga merupakan alat untuk mengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang digali oleh daerah tersebut. Kemampuan menjalankan ekonomi diukur dari seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari empat, yaitu:

1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pribadi atau badan bersifat memaksa sesuai undang-undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kepentingan rakyat (Wiguna & Jati, 2019).

2) Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran daerah dalam bentuk retribusi jasa atau penerbitan izin tertentu oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau pengusaha. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, jenis retribusi daerah dibagi menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan (Wiguna & Jati, 2019).

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti pembagian laba atas pernyataan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas modal pada perusahaan BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat (Nauw & Riharjo 2021).

4) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah adalah jenis penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan lain-lain memberi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan, baik berupa kegiatan usaha, maupun berupa kegiatan untuk memberikan atau memperkuat kebijakan pemerintah di suatu daerah tertentu.

2.1.4 Dana Perimbangan

Menurut undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Dana Perimbangan disebut juga dana transfer dari pemerintah yang digunakan untuk membantu membiayai otonomi daerah (Sari, 2016).

Dana Perimbangan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan, dan meningkatkan efektivitas biaya otonomi daerah. Pembagian dana perimbangan yang tidak merata, dapat berdampak pada ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, karena pada kenyataannya dana perimbangan hanya diberikan sebagai insentif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Puspita, 2018).

Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terdiri atas:

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah sesuai

dengan persentasenya untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi. Tujuan adanya dana bagi hasil adalah untuk meningkatkan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki suatu daerah (Maulina, Alkamal, & Fahira, 2021).

Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil pajak dan dana hasil bukan pajak (SDA). Dana bagi hasil pajak bersumber dari Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak Bumi Bangunan (PBB), serta Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan, dana bagi hasil bukan pajak berasal dari minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan (Siregar, 2015).

Penerimaan dana bagi hasil tergantung pada kemampuan daerah untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah yang potensial. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi pajak dan sumber daya alam di setiap daerah, dengan begitu maka proporsi dana bagi hasil terhadap pemerintah daerah akan meningkat (Nurhasanah & Maria 2017).

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan. Dana alokasi umum merupakan dana transfer yang diperoleh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah dan kebutuhan daerah dalam penerapan desentralisasi (Sari & Halmawati, 2021).

Dana alokasi umum dikategorikan sebagai transfer tidak bersyarat (*unconditional grant*) yaitu bentuk transfer pada tingkat pemerintah terkait dengan program pengeluaran tertentu. Sebagai transfer tanpa bersyarat maka penggunaan dana alokasi umum ditentukan sendiri oleh daerah. Tetapi meskipun demikian pemanfaatan dana alokasi umum harus sesuai dengan fungsinya melalui penerapan formula dengan memperhatikan kebutuhan dan peluang daerah (Machmud & Radjak, 2018).

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Salah satu sumber pendapatan daerah yang merupakan bagian dari dana perimbangan yaitu ada dana alokasi khusus. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Nauw & Riharjo 2021).

Dana alokasi khusus merupakan dana yang sesuai dengan tugasnya membiayai kegiatan-kegiatan bersifat khusus yang menjadi perhatian daerah sesuai dengan fungsinya, yang merupakan pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah tertentu, terutama untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat bidang tertentu (Machmud & Radjak, 2018).

2.1.5 Ukuran Pemerintah (*Size*)

Size (ukuran) adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. *Size* yang diukur dengan total aset akan lebih baik karena nilai aset dianggap lebih stabil (Kusumawardani, 2012). Aset yang dimiliki dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang besar diperkirakan mempunyai potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (Novia & Kartim, 2019).

Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional, sehingga mempermudah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang memadai. Selain itu, kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran akses dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemajuan daerah sebagai bukti atas peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012).

Dalam penelitian ini *size* atau ukuran pemerintah diprosikan dari jumlah total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat membantu kinerja yang besar. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat (Fitasari & Ismawati 2020).

2.1.6 *Leverage*

Menurut penelitian Kusumawardani, (2012) *leverage* adalah rasio total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *leverage* merupakan gambaran perbandingan antara total modal yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan total kewajiban.

Dalam sektor publik, *leverage* atau rasio utang dapat digunakan kreditor untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang yang dimiliki (Putri & Priyadi, 2021).

Leverage merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang dengan alasan daerah tersebut tidak mampu membiayai daerahnya dengan modal sendiri. Secara keseluruhan, rasio utang atau *leverage* merupakan salah satu indikator yang penting dalam menunjukkan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Penerapan rasio *leverage* pada pemerintah daerah berbeda dengan yang ada di suatu perusahaan. hal itu disebabkan oleh pendanaan eksternal pemerintah daerah yang bukan hanya sekedar dari utang, melainkan melalui bantuan pemerintah pusat, yaitu dana perimbangan. Pemerintah daerah yang mempunyai rasio hutang tinggi maka akan memiliki tingkat risiko yang tinggi juga (Banunaek, Manafe, & Perseveranda, 2022).

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Andjarwati dkk., (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati dkk., (2021) berjudul “*Analysis Of Local Own Revenue And Balancing On The Financial Performance Of Dustrict And Cities In The Regions Of East Java Province*”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Ilmiyyah, Dewata, dan Sarikadarwati (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyyah, Dewata dan Sarikadarwati tahun 2017 berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015”. Penelitian ini mengkaji bagaimana opini audit, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, *size*, *leverage*, klaster kemampuan keuangan daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, ukuran legislatif, *size*, *leverage* dan klaster kemampuan keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

3. Natoen dkk., (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Natoen dkk., tahun 2017 berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan”. Penelitian ini mengkaji bagaimana *population*, *size*, *wealth*, *intergovernmental revenue* mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *population*, *size*, *wealth*, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan *intergovernmental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

4. Saraswati dan Rioni (2019)

Penelitian Saraswati dan Rioni tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah “. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

5. Novia dan Kartim (2019)

Penelitian Novia dan Kartim tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Size*, *Wealth*, *Leverage* dan *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua”. Penelitian ini mengkaji bagaimana *size*, *wealth*, *leverage* dan *intergovernemental revenue* mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *size*, *leverage* dan *intergovernemental revenue* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan *wealth* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

6. Prastiwi dan Aji (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi dan Aji tahun 2020 berjudul ”Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Balanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana

keistimewaan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

7. Nurhayati dan Hamzah (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dan Hamzah tahun 2020 berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

8. Putri dan Amanah (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Amanah tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

9. Maulina, Alkamal, dan Fahira (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Maulina, Alkamal dan Fahira tahun 2021 berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan belanja modal dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

10. Nauw dan Riharjo (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Nauw dan Riharjo tahun 2021 berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah pada 13 Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat pada tahun 2015-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

11. Ardelia dkk. (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardelia., dkk tahun 2022 berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah belanja modal dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada Kota/Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pekalongan pada periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.

12. Adinata dan Efendi (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Adinata dan Efendi tahun 2022 berjudul “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini mengkaji bagaimana *leverage*, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan daerah pada 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

13. Dessy dan Junita (2022)

Penelitian yang dilakukan Dessy dan Junita tahun 2022 berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, *Leverage*, Ukuran Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan”. Penelitian ini mengkaji bagaimana Pendapatan Asli Daerah, *leverage*, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan mempengaruhi kinerja keuangan pada 25 Kabupaten dan 8 Kota di

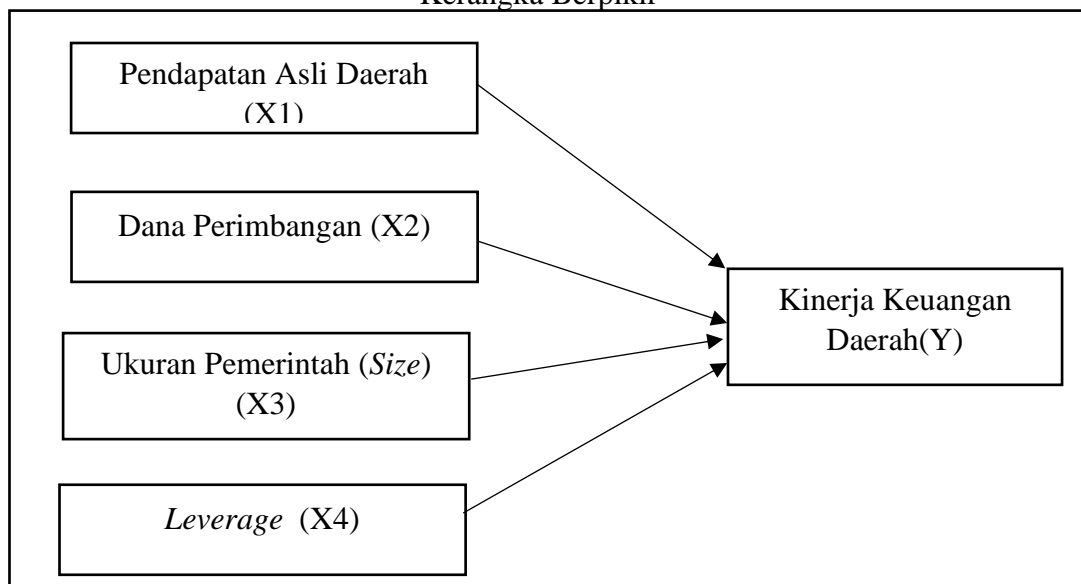
Sumatera Utara pada tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, *leverage* ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Pertautan antar variabel selanjutnya dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini bisa digambarkan bagaimana pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Perimbangan (X2) Ukuran Pemerintah Daerah (X3) dan *Leverage* (X4) serta variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan daerah. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Gambar 2 1
Kerangka Berpikir



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah memiliki hubungan dengan teori *stewardship* dimana ketika pihak pengelola atau pemerintah tidak mementingkan tujuan individu maka diharapkan penerimaan pendapatan asli daerah lebih maksimal dengan adanya kebijakan yang tepat sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Menurut Teori *Stewardship*, *steward* dituntut untuk menggunakan hasil pendapatan asli daerah secara terbuka dan bebas dari penyelewengan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan (Donaldson & Davis, 1991).

Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah akan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah mendukung pertumbuhan pendapatan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat (Antari & Sedana, 2018).

Meningkatnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan pendapatan asli daerah. Tingginya pendapatan asli daerah juga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja keuangan daerah (Antari & Sedana 2018).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati dkk. (2021), Maulina, Alkamal, & Fahira, (2021), dan Andaresta, Aswar, & Ermawati

(2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Dana perimbangan memiliki hubungan dengan teori *stewardship* dimana pemerintah daerah yang bertindak sebagai *steward* dan masyarakat sebagai prinsipal, yang mengawasi jalannya pemerintahan berdasarkan kinerjanya. Sehingga pemerintah daerah harus bertindak dengan tujuan mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian maupun pelayanan publik (Angelina dkk., 2020).

Dana perimbangan cukup berperan penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit, karena tidak semua daerah memiliki potensi yang sama untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga dana perimbangan dapat menjadi sumber tambahan keuangan bagi daerah. (Istiza, Anis, & Yulitiawati, 2021).

Daerah dengan sumber daya yang rendah membutuhkan bantuan dana untuk dapat mencapai standar pelayanan yang minimum. Dengan demikian, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan semakin kuat

pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi menurun (Armaja dkk., 2017).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati dkk., (2021), dan Prastiwi & Aji, (2020) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Daerah yang memiliki jumlah aset yang besar akan lebih memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan secara mandiri. Terdapat hubungan teori *stewardship* yang muncul yaitu suatu daerah yang memiliki total aset yang lebih besar maka pemerintah daerah sebagai *steward* harus menjadi pengelola aset yang baik dan bertanggungjawab sehingga akan maksimal dalam memberikan pelayanan kepada publik dan dapat meningkatkan kinerja keuangan (Safitri et al., 2022)

Ukuran pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran yang

besar dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah (Natoen dkk. 2017).

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang besar seharusnya dapat memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Sehingga tuntutan kinerja akan meningkat sesuai dengan meningkatnya aset yang dimiliki (Kusumawardani, 2012).

Hal ini di dukung dengan penelitian Aulia & Rahmawaty, (2020) dan Nurhayati & Hamzah (2020) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemrintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H3 : Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.4.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Leverage memiliki hubungan dengan teori *stewardship* yang berarti pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana untuk memnuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan pinjaman kepada pihak luar. Pemerintah daerah akan mengelola pinjaman daerah tersebut secara amanah sesuai dengan peruntukannya yaitu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* yang

menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kesejahteraan masyarakat (Aji & Mukhibad, 2020).

Leverage adalah rasio utang terhadap aset yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dimiliki daerah terbebani oleh utang dengan cara membandingkan total hutang terhadap total aset daerah. Sehingga hasilnya dapat digunakan kreditor untuk mengukur kemampuan daerah dalam melunasi hutangnya. Semakin tinggi *leverage* yang dimiliki maka semakin buruk kinerja keuangan daerah. Artinya daerah tersebut tidak mampu membiayai operasionalnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan pinjaman dana dari luar (Sari, 2016).

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Rioni, (2019), Fitasari & Ismawati, (2020) dan Kusumawardani, (2012) *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan diatas hipotesisi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : *Leverage* Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama bulan November 2022 sampai dengan selesai. Alasan pemilihan waktu tersebut karena waktu tersebut digunakan untuk melakukan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan akhir dalam memperoleh gelar sarjana. Wilayah yang digunakan pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme, dan dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel yang terpilih, dan dikumpulkan melalui instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik serta bertujuan untuk menguji asumsi atau hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015:8). Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* terhadap kinerja keuangan daerah.

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2019), populasi merupakan totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti dan memiliki karakteristik yang sama, berupa individu dari kelompok maupun peristiwa yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdapat 29 Kabupaten dan 6 Kota. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2017 hingga tahun 2021, sehingga populasi yang digunakan sejumlah 35.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono, (2019) Sampel merupakan bagian besar dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 35 Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan periode waktu tahun 2017 sampai dengan 2021 sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 175 data.

3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan penentuan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019). Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah Provinsi Jawa tengah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan (Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021).
- 2) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 – 2021.

Tabel 3 1
Kronologi Pemilihan sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Pemerintah daerah Provinsi Jawa tengah yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mencantumkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan (Laporan Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021).	35
2.	Pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang tidak mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2017 – 2021	(2)
3.	Jumlah Tahun	5
Sampel penelitian		165

Sumber: data yang diolah (2023)

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh dari sumber lain yang dapat mendukung penelitian seperti lewat dokumen atau orang lain (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder penelitian ini bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah tahun 2017-2021. Sumber data

yang diperoleh dari web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada www.djpk.kemenkeu.go.id serta situs resmi instansi setempat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari laporan keuangan yang dibutuhkan secara online melalui permintaan informasi publik (Sugiyono, 2019).

3.6 Variabel Penelitian

3.6.1 Variabel Dependen

Menurut Sugiyono, (2019) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah Kinerja Keuangan Daerah.

3.6.2 Variabel Independen

Menurut Sugiyono, (2019) Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menyebabkan timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel Independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage*.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3 2
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Pengertian	Indikator Pengukuran
1.	Kinerja Keuangan Daerah	Kinerja keuangan adalah derajat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah selama periode tertentu melalui sistem keuangan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan (Natoen dkk. 2017).	Rasio kemandirian= $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ (Amalia & Haryanto 2019)
2.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, yang berfungsi untuk membiayai pembangunan	Pendapatan Asli Daerah = Ln (Pendapatan Asli Daerah) (Maulina dkk., 2021)

		daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Mulyani & Wibowo 2017).	
3.	Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Perimbangan disebut juga dana transfer dari pemerintah yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan otonomi daerah (Sari, 2016)	Dana Perimbangan = Ln (Dana Perimbangan) (Maulina dkk., 2021)
4.	Ukuran Pemerintah Daerah (<i>size</i>)	<i>Size</i> (ukuran) adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang	$Size = Ln$ Total Aset Pemerintah Daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020)

		<p>besar kemungkinan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat</p> <p>(Novia & Kartim, 2019)</p>	
5.	<i>Leverage</i>	<p><i>Leverage</i> merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar ketergantungan suatu daerah pada kreditur untuk membiayai aset daerahnya. Kreditur menggunakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya (Sari 2016).</p>	$\frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$ <p>(Sari, 2016)</p>

Sumber: data yang diolah (2023)

3.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperlukan analisis lebih lanjut untuk dapat menarik kesimpulan yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan alat uji Eviews 10. Pada analisis data panel, beberapa langkah perlu dilakukan diantaranya adalah:

3.8.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Dengan menggunakan statistik deskriptif, maka dapat diketahui nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

3.8.2 Estimasi Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model regresi data panel, terdapat tiga model pendekatan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, *Random Effect Model*.

1. *Common Effect Model (CEM)*

Pendekatan ini adalah pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section*. Pada model pendekatan ini mengabaikan dimensi waktu ataupun dimensi ruang yang dimiliki data panel. Metode ini menggunakan pendekatan Ordinary least square atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model *Fixed Effect* mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasikan melalui perbedaan intersepnya. Oleh karena itu, dalam model *fixed effect*, setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi menggunakan variabel dummy. Cara untuk memperhatikan unit *cross section* pada model regresi data panel adalah dengan

mengijinkan nilai intersep yang berbeda-beda pada setiap unit *cross section* tapi masih mengasumsikan slope koefisien tetap (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Random Effect Model (REM)

Berbeda dengan *Fixed effect model*, efek spesifik dari masing-masing individu diberlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak dan tidak tergantung pada variabel penjelas yang diamati. Model ini disebut model *Random Effect Model* (REM) (Ghozali & Ratmono, 2017).

3.8.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji yang dapat dijadikan alat untuk memilih model (CEM, FEM, atau REM), berdasarkan karakteristik data yang dimiliki yaitu:

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji yang digunakan untuk pemilihan model *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai probability F signifikan, apabila nilai probability $F < 0,05$ maka model FEM lebih baik dari pada CEM. Apabila probability F signifikan $> 0,05$ maka model CEM lebih baik dibandingkan dengan FEM.

2. Uji Hausman

Uji hausman merupakan uji yang digunakan untuk pemilihan model *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini dilakukan dengan

cara membandingkan probabilitas *Chi-Square* dengan signifikan. Apabila nilai *chi-square* $< 0,05$ maka model FEM lebih baik dibandingkan dengan REM. Apabila *chi-square* $> 0,05$ maka model REM lebih baik dibandingkan FEM.

3. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji langrange multiplier merupakan uji yang digunakan untuk memilih model *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini dilakukan apabila dalam pengujian uji chow yang diterima adalah *Common Effect Model* (CEM).

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah memenuhi asumsi-asumsi dasar dari asumsi klasik, pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan uji statistik *Jarque-Bera Test* (JB). *Jarque-Bera Test* merupakan alat uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 5% atau 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal (Ghozali & Ratmono, 2017).

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara variabel independen. Indikasi terjadinya multikolonieritas apabila korelasi di antara masing-masing variabel lebih besar dari 0,8 (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* atau residual data pengamatan ke data pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melakukan *uji glejser*. Data dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila probability $> 0,05$ (Ghozali & Ratmono, 2017).

4. Uji Autokorelasi

Tujuan pengujian autokorelasi pada model adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pada periode sebelumnya atau terdapat variabel pengganggu ($et-1$). Autokorelasi merupakan korelasi anatar urutan pengamatan dari waktu ke waktu (*time series*). Autokorelasi dapat berupa autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Penggunaan uji *Durbin-Watson* (DW) untuk mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Pengujian ini membandingkan nilai DW hasil *output eviws* dengan tabel DW. Kriteria uji DW mengikuti tabel berikut ini:

Tabel 3 3
Tabel Keputusan Durbin-Watson

Nilai Statistik	Hasil
$0 < d < dl$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi positif
$Dl \leq d \leq du$	Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan
$Du < d < 4 - du - dl$	Meneria hipotesisi nol, tidak ada autokorelasi positif/negatif.
$4 - du < d < 4 - dl$	Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan
$4 - dl - \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi negatif.

3.8.5 Analisis Model Regresi Data Panel

Analisis model regresi data panel digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan sejauh mana hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kinerja keuangan daerah. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PF = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DP_{it} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 LEV_{it} + e$$

Dimana:

PF = *Performance Financial* (kinerja keuangan)

α = Konstanta

i = *Cross section*

t = periode waktu

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

Size = Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*)

Lev = *Leverage*

e = Standar *Error*

3.8.6 Uji Ketepatan Model

Pengujian hipotesis digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y (Kinerja Keuangan Daerah), dengan variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), Ukuran Pemerintah Daerah (X3) dan *Leverage* (X4).

1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan bahwa apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono, 2017). Kriteria pengambilan keputusan dari uji F yaitu:

- 1) Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- 2) Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan suatu besaran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi seluruh variabel independen dapat menerangkan variabel dependen. Koefisien determinasi berikisar antara 0-1. Semakin besar nilai koefisien determinasi maka semakin besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen begitu juga sebaliknya (Ghozali & Ratmono, 2017).

3. Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan (Ghozali &

Ratmono, 2017). Kriteria pengambilan keputusan uji t dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) yaitu sebagai berikut:

- a. Jika $\alpha < 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika $\alpha > 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima, variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ibu kotanya ada di Semarang. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Batas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat, sebelah timur ada Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau 32,544,12 km². Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota yang terdiri dari 576 Kecamatan yang terbagi menjadi 7.809 desa dan 753 kelurahan. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 37,49 juta jiwa. Terdiri dari 18,86 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 18,63 juta berjenis kelamin perempuan.

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal ini maka data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui keadaan umum suatu data. Perhitungan statistik deskriptif dari semua variabel penelitian yang terdiri dari kinerja keuangan sebagai variabel dependen, kemudian pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* sebagai variabel independen. Berikut merupakan tabel hasil analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel penelitian:

Tabel 4 1
Analisis Statistik Deskriptif

	Y_KK	X1_PAD	X2_DP	X3_SIZE	X4_LEV
Mean	0.184485	26.63624	27.84121	28.99279	0.012788
Median	0.170000	26.58000	27.89000	28.91000	0.010000
Maximum	0.490000	28.50000	28.29000	31.06000	0.170000
Minimum	0.100000	25.91000	26.98000	28.16000	0.000000
Std. Dev.	0.065615	0.409125	0.315697	0.435135	0.016986
Skewness	2.306843	2.069307	-1.350096	2.186156	5.676667
Kurtosis	9.784442	9.722687	4.311843	10.38831	48.02263
Jarque-Bera	462.7888	428.4682	61.95730	506.7166	14822.05
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	30.44000	4394.980	4593.800	4783.810	2.110000
Sum Sq. Dev.	0.706081	27.45087	16.34496	31.05212	0.047318
Observations	165	165	165	165	165

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, maka hasil uji statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel X1 atau pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 25.91000 dan nilai maksimum sebesar 28.50000. Hasil tersebut menunjukkan besar pendapatan asli daerah berkisar antara 25.91000 hingga 28.50000. Nilai terendah terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 2018 dan nilai tertinggi terjadi di Kota Semarang tahun 2021. Nilai mean (rata-rata) sebesar 26.63624 pada standar deviasi sebesar 0.409125. Nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi yang berarti simpangan data dalam sampel penelitian relatif kecil sehingga penyebaran data normal dan tidak bias.

2. Dana Perimbangan (X2)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan variabel X2 atau dana perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 26.98000 dan nilai maksimum sebesar 28.29000. Hasil ini menunjukkan bahwa besar dana perimbangan berkisar antara 26.98000 sampai dengan 28.29000. Nilai terendah terjadi di Kota Salatiga tahun 2020 dan nilai tertinggi terjadi pada Kabupaten Banyumas tahun 2019. Nilai mean (rata-rata) sebesar 27.84121 dengan standar deviasi sebesar 0.315697. Nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasi yang berarti simpangan data dalam penelitian relatif kecil.

3. Ukuran Pemerintah Daerah (size) (X3)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwa variabel X3 atau ukuran pemerintah daerah (size) memiliki nilai minimum 28.16000 dan nilai maksimum sebesar 31.06000. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dalam

penelitian ini berkisar antara 28.16000 hingga 31.06000. Nilai minimum terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan nilai tertinggi terjadi pada Kota Semarang 2018. Nilai mean (rata-rata) sebesar 28.99279 pada standar deviasi sebesar 0.435135. Nilai mean (rata-rata) lebih besar dari standar deviasi yang berarti bahwa simpangan data dalam sampel penelitian relatif kecil.

4. *Leverage* (X4)

Hasil statistik deskriptif memperlihatkan X4 atau variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0.000000 dan nilai maksimum sebesar 0.170000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *leverage* berkisar antara 0.000000 hingga 0.170000. Nilai minimum tersebut terdapat pada Kota Magelang 2019 dan nilai maksimum terdapat pada Kabupaten Wonosobo 2020. Nilai mean (rata-rata) sebesar 0.012878 pada standar deviasi 0.016986. Nilai rata-rata (mean) lebih kecil dari nilai standar deviasi sehingga menunjukkan bahwa penyimpangan variabel *leverage* relatif besar sehingga ada penyimpangan data cukup besar.

4.2.2 Pengujian Model Regresi Data Panel

Dalam pengujian regresi data panel terdapat tiga pendekatan model regresi yang dapat digunakan yaitu Model *Common Effect* (CEM), Model *Fixed Effect* (FEM), dan Model *Random Effect* (REM). Adapun hasil pengujian dari masing-masing model yaitu sebagai berikut:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Common effect model adalah teknik pendekatan dengan mengabaikan *time series* dan *cross section*. Mengasumsikan bahwa intersep dan slop memiliki kesamaan baik untuk *time series* maupun *cross section*.

Tabel 4 2
Hasil Regresi Model CEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_PAD	0.159707	0.005110	31.25264	0.0000
X2_DP	-0.186535	0.004252	-43.86488	0.0000
X3_SIZE	0.012266	0.004515	2.716907	0.0073
X4_LEV	-0.026898	0.068902	-0.390384	0.6968
C	0.768571	0.109239	7.035704	0.0000
R-squared	0.951495	Mean dependent var	0.184485	
Adjusted R-squared	0.950282	S.D. dependent var	0.065615	
S.E. of regression	0.014631	Akaike info criterion	-5.581569	
Sum squared resid	0.034249	Schwarz criterion	-5.487450	
Log likelihood	465.4795	Hannan-Quinn criter.	-5.543363	
F-statistic	784.6519	Durbin-Watson stat	0.861903	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Pendekatan *fixed effect model* ini terdapat dua model asumsi, asumsi yang pertama yaitu terdapat slope konstan namun terdapat variasi intersep antar individu. Sedangkan asumsi yang kedua yaitu terdapat slope konstan, namun terdapat variasi

intersep antar periode waktu. Hasil regresi data panel pada model FEM dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 4 3
Hasil Regresi Model FEM

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/16/23 Time: 15:08
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.540683	0.284974	-5.406392	0.0000
X1_PAD	0.143895	0.004168	34.52790	0.0000
X2_DP	-0.060975	0.008626	-7.068500	0.0000
X3_SIZE	-0.014146	0.004284	-3.301654	0.0012
X4_LEV	0.006913	0.037640	0.183663	0.8546

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

3. *Random Effect Model (REM)*

Model pendekatan *random effect* ini melibatkan korelasi antar *error terms* karena terjadinya perubahan objek (*cross section*) maupun waktu penelitian (*time series*). Hasil regresi data panel pada model *random effect* (REM) dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 4
Hasil Regresi Model REM

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/12/23 Time: 11:49

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.149978	0.156642	0.957457	0.3398
X1_PAD	0.144873	0.003756	38.56673	0.0000
X2_DP	-0.130789	0.005249	-24.91673	0.0000
X3_SIZE	-0.006307	0.003660	-1.722953	0.0868
X4_LEV	-0.015364	0.036562	-0.420225	0.6749

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.010974	0.7802
Idiosyncratic random		0.005826	0.2198

Weighted Statistics			
R-squared	0.877566	Mean dependent var	0.042612
Adjusted R-squared	0.874505	S.D. dependent var	0.023089
S.E. of regression	0.008179	Sum squared resid	0.010704
F-statistic	286.7062	Durbin-Watson stat	1.381514
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.888499	Mean dependent var	0.184485
Sum squared resid	0.078728	Durbin-Watson stat	0.187832

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

4.2.3 Pengujian Kesesuaian Model Regresi Data Panel

Dari tiga model regresi data panel yang sudah dijelaskan di atas, selanjutnya perlu dilakukan pemilihan model yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Pemilihan model tersebut dapat dilakukan dengan cara menguji spesifikasi model

melalui uji chow, uji hausman, dan uji *lagrange multiplier*. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

1. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih antara model *Common Effect Model* (CEM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Uji ini digunakan untuk mengetahui perbandingan nilai probability F dengan signifikan. Apabila nilai probability F < 0,05 (prob < 0,05) maka model yang terpilih adalah model FEM (*fixed effect model*). Sebaliknya jika nilai probability F > 0,05 (prob > 0,05) maka model terpilih adalah model CEM (*common effect model*).

Hipotesis Uji Chow adalah sebagai berikut:

H₀: *Common Effect Model*

H_a: *Fixed Effect Model*

Tabel 4 5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM2
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.536292	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	340.699365	32	0.0000

Sumber: Olah Data Eviews 10

Dari tabel hasil uji chow dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah sebesar =0.0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.0000 < 0.05). sehingga H_a diterima dan H₀ ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM (*fixed effect model*) karena yang terpilih model FEM maka dilanjutkan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk memilih model estimasi data panel antara FEM (*fixed effect model*) dan REM (*random effect model*) yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian. Untuk menentukan model mana yang paling tepat, dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Ketentuannya yaitu apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 ($\text{prob} < 0.05$) maka model estimasi yang tepat adalah menggunakan FEM (*fixed effect model*). Tetapi jika nilai probabilitas lebih besar dari 0.05 ($\text{prob} > 0.05$) maka model estimasi yang tepat adalah REM (*random effect model*).

Hipotesis uji hausman adalah sebagai berikut:

H0: *Random Effect Model*

Ha: *Fixed Effect Model*

Tabel 4 6
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	159.400213	4	0.0000

Sumber: Hasil Olah Sata Eviews 10

Dari tabel hasil uji hausman dapat dilihat bahwa nilai probabilitas adalah 0.0000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05 ($0.0000 < 0.05$). sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah model FEM (*fixed effect*

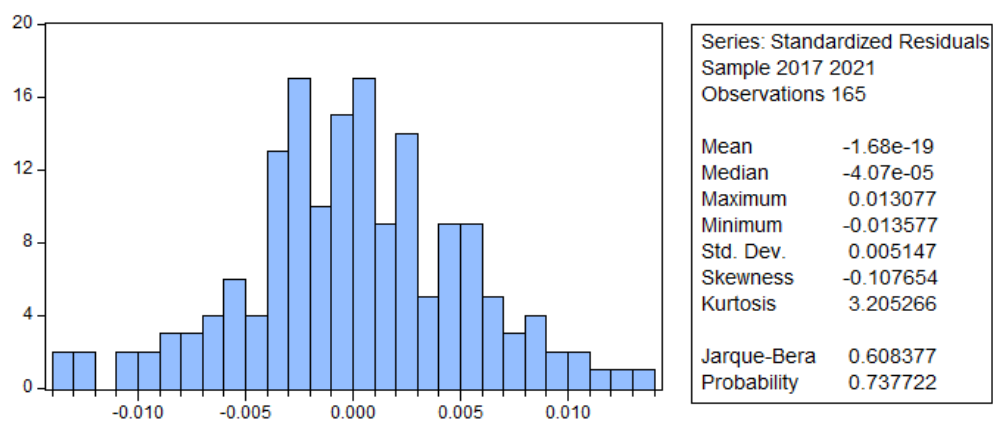
model). Dikarenakan model FEM yang terpilih maka tidak perlu melakukan pengujian lanjutan dengan uji lagrange multiplier.

4.2.4 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk mengetahui data tersalurkan normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik *Jarque-Bera Test* (JB). *Jarque Bera* (JB) adalah alat uji statistik untuk mengetahui apakah data tersalurkan dengan normal atau tidak. Apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0.05 atau 5% maka dapat disebut data tersalurkan normal (Winarno, 2015).

Tabel 4 7
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji normalitas di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas *Jarque-Bera* adalah sebesar 0.737722, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.737722 > 0.05$). sehingga hal tersebut

menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal dan lulus uji normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Uji ini digunakan untuk mengetahui terjadinya multikolonieritas dengan melihat nilai korelasi sederhana antar variabel independen, jika lebih besar dari 0,8 maka model penelitian ini terdapat masalah multikolonieritas. Sebaliknya, jika nilainya lebih kecil dari 0,8 maka model penelitian ini lolos masalah multikolonieritas.

Tabel 4 8
Hasil Uji Multikolonieritas

	X1_PAD	X2_DP	X3_SIZE	X4_LEV
X1_PAD	1.000000	0.519350	0.805912	-0.105617
X2_DP	0.519350	1.000000	0.385704	0.008690
X3_SIZE	0.805912	0.385704	1.000000	-0.191051
X4_LEV	-0.105617	0.008690	-0.191051	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa semua korelasi antara variabel independen tidak ada yang memiliki nilai lebih dari 0.8. sehingga dapat diartikan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi multikolonieritas atau dalam model ini tidak terdapat korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain atau tidak. Untuk melihat apakah pada model regresi terdapat gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Ketentuannya

apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, maka dalam model regresi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Tetapi apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka dalam model regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan tabel hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 4 9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 05/16/23 Time: 13:30

Sample: 1 165

Included observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.078693	0.073991	-1.063545	0.2891
X1_PAD	0.002647	0.003458	0.765619	0.4450
X2_DP	-0.003314	0.002877	-1.151614	0.2512
X3_SIZE	0.003835	0.003050	1.257241	0.2105
X4_LEV	-0.001535	0.048661	-0.031554	0.9749

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Dari tabel hasil uji heteroskedastisitas di atas, dapat dilihat bahwa semua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) dan *Leverage* memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0.05, sehingga nilai tersebut dapat diartikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dan periode sebelumnya. Uji autokorelasi dilihat melalui nilai DW (*durbin watson*), yaitu melalui perbandingan antara nilai DW hitung dengan nilai DW tabel (DU dan DL).

Adapun ketentuan suatu model regresi tidak terjadi autokorelasi yaitu apabila $du \leq d \leq 4-du$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

Tabel 4 10
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews

Dari tabel hasil uji autokorelasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai DW (*Durbin Watson*) sebesar 2.047011. Kemudian nilai DW tabel pada jumlah sampel sebanyak 165 dan variabel sebanyak 4, dapat dilihat bahwa nilai DU sebesar 1.7953 dan nilai DL sebesar 1.6960. Sehingga untuk nilai 4-DU yaitu sebesar 2.2047 (4-1.7953). Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi. Hal tersebut dikarenakan nilai $Du \leq d \leq 4-du$ ($1.7953 \leq 2.047011 \leq 2.2047$).

4.2.5 Analisis Uji Regresi Data Panel

Persamaan regresi data panel dapat dilihat dari tabel hasil uji data panel yang terpilih berdasarkan output E-views versi 10 adalah model *Fixed effect*. Variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* terhadap variabel kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4 11
Hasil Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/16/23 Time: 22:18
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.540683	0.284974	-5.406392	0.0000
X1_PAD	0.143895	0.004168	34.52790	0.0000
X2_DP	-0.060975	0.008626	-7.068500	0.0000
X3_SIZE	-0.014146	0.004284	-3.301654	0.0012
X4_LEV	0.006913	0.037640	0.183663	0.8546

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan hasil analisis data panel model *fixed effect model* terlihat bahwa nilai konstanta sebesar -1.540683 dan koefisien regresi PAD sebesar 0.143895, dana perimbangan sebesar -0.060975, ukuran pemerintah daerah sebesar -0.014146, dan *leverage* sebesar -0.006913. nilai konstanta dan koefisien regresi variabel PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* ini dimasukkan dalam persamaan regresi linier data panel sebagai berikut:

$$PF = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 D_{it} + \beta_3 Size_{it} + \beta_4 LEV_{it} + e$$

Sehingga persamaan regresi data panelnya sebagai berikut:

$$PF = -1.540683 + (0.143895) PAD_{it} + (-0.060975) DP_{it} + (0.014146) Size_{it} + (-0.006913) LEV_{it} + 0.006152$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta

Nilai konstanta α sebesar -1.540683 yang artinya variabel PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah (*size*) dan *leverage* diabaikan atau bernilai nol maka kinerja keuangan sebesar konstan yaitu -1.540683.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli daerah (PAD) sebesar 0.143895 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan kinerja keuangan sebesar 0.143895.

3. Dana Perimbangan (DP)

Koefisien regresi variabel dana perimbangan adalah sebesar -0.060975 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan dana perimbangan maka menurunkan kinerja keuangan sebesar 0.060975.

4. Ukuran Pemerintah Daerah (*size*)

Koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah adalah sebesar -0.014146 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan ukuran pemerintah daerah (*size*) maka akan menurunkan kinerja keuangan sebesar 0.014146.

5. *Leverage* (LEV)

Koefisien regresi variabel *leverage* adalah sebesar -0.006913 menyatakan bahwa setiap kenaikan satu satuan *leverage* maka akan menurunkan kinerja keuangan daerah sebesar 0.006913.

4.2.6 Uji Ketepatan Model

1. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali & Ratmono 2017). Apabila prob (F-statistic) lebih kecil dari 0.05 maka secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika prob (F-statistic) lebih besar dari 0.05 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:

Ho : tidak berpengaruh secara simultan PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah (size), dan leverage terhadap kinerja keuangan daerah

H1 : ada pengaruh secara simultan PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah (size) dan leverage terhadap kinerja keuangan daerah.

Tabel 4 12

Hasil Uji F

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa pengaruh variabel PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan dengan nilai sebesar 0.000000 lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian yaitu 0,05 ($0.000000 < 0,05$).

Hasil menunjukkan bahwa variabel PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis diatas menolak H_0 dan menerima H_1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara simultan antara PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah, dan *leverage* terhadap kinerja keuangan daerah.

2. Koefisien Determinasi (R-Square)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R-squared. Berikut ini hasil analisis koefisien determinasi (R-Square):

Tabel 4 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10

Berdasarkan hasil dari perhitungan yang diperoleh nilai R sebesar 0,992117 dengan kata lain hubungan antar variabel independen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah (*size*), dan *leverage* terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan sebesar 0,992117 atau sebesar 99,2% hal ini menunjukkan bahwa besar presentase tingkat kinerja keuangan yang bisa dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu PAD, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah (*size*) dan *leverage* sebesar 99,2%.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t-statistik, sekaligus untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah dan *leverage* terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Uji t dapat dilakukan dengan melihat taraf signifikan pada masing-masing variabel. Uji t digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis diterima atau tidak. Berikut hasil dari uji t adalah:

Tabel 4 14
Hasil Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 05/16/23 Time: 13:02
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 33
Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.540683	0.284974	-5.406392	0.0000
X1_PAD	0.143895	0.004168	34.52790	0.0000
X2_DP	-0.060975	0.008626	-7.068500	0.0000
X3_SIZE	-0.014146	0.004284	-3.301654	0.0012
X4_LEV	0.006913	0.037640	0.183663	0.8546

Sumber: Data Hasil Olah Eviews 10

Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai prob untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 0.0000 dinyatakan lebih kecil dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Serta nilai koefisien untuk variabel PAD 0.143895 yang menunjukkan arah positif. Artinya, PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima.

2. Uji Hipotesis Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai prob untuk variabel dana perimbangan (DP) adalah 0.0000 dinyatakan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05 ($0,0000 < 0,05$). Serta nilai koefisien

untuk variabel dana perimbangan (DP) adalah -0.060975 yang menunjukkan arah negatif. Artinya, dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut sehingga dapat disimpulkan H2 yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah diterima.

3. Uji Hipotesis Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai untuk variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) adalah 0.0012 dinyatakan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu $0,05$ ($0.0012 < 0,05$). Serta nilai koefisien untuk variabel ukuran pemerintah daerah adalah -0.014146 yang menunjukkan arah negatif. Artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Berdasarkan hasil tersebut sehingga disimpulkan H3 yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah ditolak.

4. Uji Hipotesis Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Nilai untuk variabel leverage (LEV) adalah 0.8546 dimana nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ ($0,8546 > 0,05$) sehingga H4 yang diajukan dalam penelitian ini tidak terdukung, yang berarti bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Variabel pendapatan asli daerah (PAD) dalam penelitian ini memiliki nilai probability sebesar 0.0000 dan nilai t-statistic sebesar 34.52790. berdasarkan nilai probability menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Arah koefisiensi regresi menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.143895. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H1 yang menyatakan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah diterima.

Tingginya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat meminimalisir ketergantungan daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat karena pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempunyai keputusan yang bijak dalam menggunakan pendapatan asli daerah yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan, peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya sehingga akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik (Prastiwi & Aji, 2020).

Berdasarkan teori *stewardship*, dengan penggunaan pendapatan asli daerah yang terbuka tanpa adanya penyelewengan dan hasil dari pendapatan asli daerah

digunakan untuk membiayai kegiatan daerah bukan untuk kepentingan individu maka dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah (Mustiani & Effendy, 2022). Berdasarkan asumsi tersebut maka secara teoritis pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah yang diukur dengan rasio kemandirian.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sari, (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja keuangan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki akan berpengaruh pada kinerja keuangan yang tinggi, karena menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemandirian dalam membiayai pengeluaran daerah dan memberikan indikator bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja keuangan yang baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andjarwati dkk. (2021), Maulina, Alkamal, & Fahira (2021), Prastiwi & Aji (2020), Saraswati & Rioni (2019), Ardelia dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Variabel dana perimbangan dalam penelitian ini memiliki nilai probability sebesar 0.0000 dan nilai t-statistic sebesar -7.068500. berdasarkan nilai probability menunjukkan bahwa lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05 ($0.0000 < 0.05$). Penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian. Selain itu untuk

arah koefisien regresi menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.060975. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan diterima.

Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah karena jumlah dana perimbangan yang tinggi akan menyebabkan berkurangnya kinerja keuangan daerah terutama pada ketidakmandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat kemandirian keuangan daerah rendah karena ketergantungan yang tinggi bersifat terikat sehingga membuat pemerintah daerah tidak memiliki kebebasan dalam penggunaan sumber pendapatan (Prastiwi & Aji, 2020).

Berdasarkan dengan teori *stewardship* pemerintah daerah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*, dana perimbangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus digunakan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat baik melalui perekonomian maupun peningkatan pada layanan publik, dan pemerintah sebagai *steward* juga harus melaporkan bahwa dana perimbangan sudah diterima dengan baik dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga hal itu bisa berguna untuk meningkatkan kinerja keuangan (Angelina dkk., 2020).

Besar kecilnya penerimaan dana perimbangan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan. Penerimaan dana perimbangan yang tinggi akan menyebabkan kemandirian daerah menurun, tetapi tanpa adanya dana perimbangan daerah juga

akan kesulitan dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih mengefisiensi penggunaan dana perimbangan agar berdampak baik terhadap kemandirian daerah. Sebagai contoh penggunaan DAU sebaiknya tidak hanya untuk belanja pegawai saja tetapi dapat digunakan untuk membangun infrastruktur, dan hal tersebut juga harus dalam batas wajar dalam artian daerah tidak mementingkan kepentingan pribadi dalam menggunakan DAU tetapi untuk kepentingan rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Aji (2020), Putri & Amanah (2020), Adinata & Efendi (2022), Machfud, Asnawi, & Naz'aina (2021) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah. Semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka akan semakin kuat pemerintah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga membuat kinerja keuangan daerah semakin menurun.

4.3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (*Size*) Terhadap Kinerja

Keuangan Daerah

Variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) memiliki nilai probability 0.0012 dan nilai t-statistic -3.301654. Berdasarkan nilai probability menunjukkan bahwa nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05 ($0.0012 < 0.05$). Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Arah koefisien regresi menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.014146. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah ditolak. Karena hasil penelitian ini berpengaruh negatif.

Ukuran pemerintah daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio kemandirian. Hal ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah Jawa tengah semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya (Putri & Amanah, 2020).

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dimana Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 memiliki total aset sebesar 29,00 dengan kinerja keuangan sebesar 0,10. Sedangkan jumlah total aset yang lebih rendah dimiliki Kota Tegal pada tahun 2017 sebesar 28,45 tetapi memiliki nilai kinerja keuangan yang tinggi yaitu sebesar 0.30. Sehingga total aset yang besar tidak menjamin kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi tinggi.

Kebanyakan aset yang dimiliki pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah merupakan aset yang kurang produktif atau aset yang tidak dimanfaatkan guna memperoleh pendapatan daerah, seiring dengan meningkatnya jumlah aset yang besar harus diimbangi dengan manajemen pemerintah daerah yang baik, dimana pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan dan mengelola aset yang dimiliki supaya memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Nugroho, 2018).

Berdasarkan dengan teori *stewardship* pemerintah daerah harus menjadi pengelola yang baik bagi seluruh aset yang dimiliki oleh daerah, dan harus bertindak bertanggung jawab, tidak mementingkan kepentingan pribadi guna memaksimalkan kekayaan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Aset yang dimiliki oleh daerah harus dikelola dan dimanfaatkan supaya dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ilmiyyah, Dewata, & Sarikadarwati (2017), Putri & Amanah (2020), Saraswati & Rioni (2019), Novia & Kartim (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah

4.3.4 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Variabel *leverage* dalam penelitian ini memiliki nilai probability 0.8546 dan nilai t-statistik sebesar 0.183663. Berdasarkan nilai probability menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0.05 ($0.183663 > 0.05$) nilai koefisien regresinya yaitu 0.006913, dengan hasil nilai tingkat signifikansi tersebut maka H4 ditolak sehingga menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, tidak berpengaruh secara signifikan memiliki arti bahwa terjadinya kenaikan atau penurunan terhadap nilai *leverage* tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki kinerja keuangan

pemerintah daerahnya, hal ini dibuktikan dengan rata-rata nilai *leverage* selama tahun 2017-2021 hanya tumbuh 0,12.

Leverage dalam penelitian ini belum mampu menunjukkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan karena rasio utang antar daerah dalam penelitian ini memiliki selisih yang tidak terlalu besar, dimana nilai *leverage* hanya tumbuh sekitar 0.00 hingga 0.17 sehingga variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selisih rasio hutang yang tidak terlalu besar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terbebani oleh hutang (Minarsih, 2015).

Pada suatu unit usaha pembiayaan eksternal berupa hutang mungkin dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian karena hutang merupakan sumber pendanaan finansial yang harus diperhitungkan. Akan tetapi dalam pemerintah daerah posisi *leverage* tidak dapat disamakan pada kondisi dari suatu unit usaha karena pembiayaan eksternal pemerintah daerah tidak hanya melalui hutang, tetapi juga berasal dari dana perimbangan yang memiliki nominal cukup besar dan tanpa tanggung jawab untuk dikembalikan. Sehingga *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah (Imawan & Wahyudin, 2014).

Penelitian ini tidak sesuai dengan teori *stewardship* yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan melakukan pinjaman kepada pihak luar. Pemerintah daerah akan mengelola pinjaman tersebut secara amanah sesuai dengan peruntukannya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ilmiyah, Dewata, & Sarikadarwati (2017), Novia & Kartim (2019), Saraswati & Rioni (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ukuran pemerintah daerah (*size*) dan *leverage* terhadap kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Dari hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
2. Variabel dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
3. Variabel ukuran pemerintah daerah (*size*) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.
4. Variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan populasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 5 tahun terakhir. Akan tetapi ada beberapa kabupaten yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya pada web pemerintah kabupaten/kota nya.

2. Sampel penelitian terbatas pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten/Kota yang menjadi sampel penelitian. Sehingga hasil ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua Pemerintah Daerah di Indonesia.

5.3 Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitin ini, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya semakin memperluas populasi yang digunakan, tidak hanya berfokus pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi daerah-daerah yang lainnya, serta dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan menambahkan periode tahun terbaru.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan analisis pengukuran yang lain, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi dan analisis rasio yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, M., & Efendi, D. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–14.
- Aji, M., & Mukhibad, H. (2020). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 3(1), 97–115.
- AMachfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Amalia, A. F., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8, 1–13.
- Amin, N. (2015). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Iqtishaduna*, 80–91. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/64>
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *KORELASI: Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624.
- Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P., & Yasin, M. (2021). Analisis Of Local Own Revenue And Balancing Funds On The Financial Performance Of Districts And Cities In The Region Of East Java Province. *International Journal Of Economics And Finance Studies*, 8055, 235–250. <https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233>
- Angelina, N., Efni, Y., & Rasuli, M. (2020). Pengaruh Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Di Kabupaten / Kota Provinsi Riau. *Jurnal Bahtera Inovasi*, 4(1).
- Antari, P., & Sedana, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(2), 1080–1110.

- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Armaja, A., Ibrahim, R., & Aliamin, A. (2017). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8229>
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5(4), 584–598.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Banunaek, I. A., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Ukuran Pemerintah Daerah , dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)*. 4(1), 49–59.
- Budiana, R., & Rahayu, S. (2021). The Influence Of Local Government Revenue And Intergovernmental Revenue Of Regional Financial Performance (Case Study on Provincial Government In Indonesia In 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8368–8375.
- Dessy, R., & Junita, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia*, 3(1).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Australian Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ernawati, & Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 73–81.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/10>

9/97

- Fitasari, P., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar). *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan*, IX(1), 33–40.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika. (Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 10)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Ilmiyyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015. *Jurnal Antansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.446>
- Imawan, R., & Wahyudin, A. (2014). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 147–155. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Irene, M., & Siregar, C. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Propinsi Papua. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 26–42.
- Istiza, D., Anis, F., & Yulitiawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Jurnal ETAP*, 2(13), 47–61.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Mahmudi. (2016). *analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (p. 140). STIM

YKPN.

- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Matande, I. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Toraja Utara. *Economics Bosowa Journal*, 5(001), 515–527.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Mustiani, I., & Effendy, L. (2022). *Analisis Tingkat Keberhasilan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota Mataram*. 10, 403–418.
- Natoen, A., Febriyanti, A., Sarikadarwati, & Ardiani, S. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3(2).
- Nauw, E., & Riharjo, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Novia, R., & Kartim. (2019). Pengaruh Size, Wealth, leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 1.
- Nugroho, T. R. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Nurhasanah, & Maria. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 1(1), 60–73.
- Nurhayati, N., & Hamzah, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi & Manajemen*, 1(1), 22–34.

- Nuwun, P., Ari, F., & Yulida, N. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 5(2), 212–225. <https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202>
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1573. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018). *Jurnal Kajian Bisnis*, 28(1), 89–105.
- Puspita, A. (2018). Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007>
- Putri, K., & Darmayanti, P. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Putri, R., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20.
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Rahareng, I., & Saleh, M. (2022). Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Kota Sorong Dan Pengawasan Dprd Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Jatiswara*, 37(1), 93–105.
- Safitri, B., Dirgantari, N., Hariyanto, E., & Winarni, D. (2022). Pengaruh PAD, Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, Dan Perubahan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021). *Jurnal EK&BI (Ekonomi & Bisnis)*, 5, 401–409. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.695>
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh Wealth, Leverage, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8479–8487.

- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515–1534.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *JURNAL Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, B., & Halmawati. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 1, 2*. 3(1), 1–11.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Siregar. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual)*. STIM YKPN.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 85. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p04>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The Effect of Regional Characteristics , Leverage , Government Complexity , BPK Audit Findings and Opinions on Local Government Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aaaj.v9i1.22483>
- Winarno. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. UPP STIM YKPN.

LAMPIRAN

Lampiran 2 Daftar Pemerintah Daerah

Tabel

Sampel Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Pemerintah Daerah	No	Nama Pemerintah Daerah
1.	Kabupaten Banjarnegara	20.	Kabupaten Purworejo
2.	Kabupaten Banyumas	21.	Kabupaten Rembang
3.	Kabupaten Batang	22.	Kabupaten Semarang
4.	Kabupaten Blora	23.	Kabupaten Sragen
5.	Kabupaten Boyolali	24.	Kabupaten Sukoharjo
6.	Kabupaten Brebes	25.	Kabupaten Tegal
7.	Kabupaten Cilacap	26.	Kabupaten Temanggung
8.	Kabupaten Demak	27.	Kabupaten Wonogiri
9.	Kabupaten Grobogan	28.	Kabupaten Wonosobo
10.	Kabupaten Jepara	29.	Kota Magelang
11.	Kabupaten Karangayar	30.	Kota Pekalongan
12.	Kabupaten Kebumen	31.	Kota Salatiga
13.	Kabupaten Kendal	32.	Kota Semarang
14.	Kabupaten Klaten	33.	Kota Tegal
15.	Kabupaten Kudus		
16.	Kabupaten Magelang		
17.	Kabupaten Pati		
18.	Kabupaten Pekalongan		
19.	Kabupaten Purbalingga		

Lampiran 3 PAD sebelum dan sesudah di LN

Nama Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	LN_PAD
		X1	
Kabupaten Banjarnegara	2017	297.485.382.003	26.4186309
	2018	235.994.436.137	26.1870741
	2019	257.700.650.110	26.2750645
	2020	238.638.994.321	26.1982178
	2021	313.830.623.336	26.4721193
kabupaten Banyumas	2017	619.701.627.380	27.1525040
	2018	648.326.914.035	27.1976609
	2019	686.805.512.326	27.2553170
	2020	668.211.148.299	27.2278701
	2021	761.991.440.173	27.3592012
Kabupaten Batang	2017	219.807.128.307	26.1160163
	2018	237.547.973.048	26.1936354
	2019	245.836.087.092	26.2279308
	2020	257.422.866.095	26.2739860
	2021	322.789.372.918	26.5002659
Kabupaten Blora	2017	280.042.019.102	26.3582055
	2018	203.182.795.054	26.0373719
	2019	246.863.066.484	26.2320996
	2020	299.687.660.301	26.4260066
	2021	326.770.477.077	26.5125239
Kabupaten Boyolali	2017	388.014.897.386	26.6843096
	2018	342.957.213.726	26.5608715
	2019	395.431.863.402	26.7032443
	2020	451.543.582.894	26.8359377
	2021	514.970.001.434	26.9673745
Kabupaten Brebes	2017	523.660.773.732	26.9841099
	2018	346.907.972.510	26.5723254
	2019	379.091.298.714	26.6610429
	2020	392.541.730.819	26.6959087
	2021	518.511.128.705	26.9742273
Kabupaten Cilacap	2017	648.091.381.096	27.1972975
	2018	527.577.740.281	26.9915621
	2019	574.276.795.303	27.0763773
	2020	591.343.787.160	27.1056634

Nama Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	LN_PAD
		X1	
	2021	739.133.833.863	27.3287448
Kabupaten Demak	2017	309.612.407.201	26.4585871
	2018	342.324.870.245	26.5590260
	2019	407.400.540.995	26.7330627
	2020	439.694.424.385	26.8093458
	2021	445.010.135.308	26.8213629
Kabupaten Grobogan	2017	440.456.238.668	26.8110769
	2018	315.743.531.675	26.4781961
	2019	344.559.032.450	26.5655313
	2020	350.453.524.065	26.5824939
	2021	424.186.340.266	26.7734387
Kabupaten Jepara	2017	325.530.346.533	26.5087215
	2018	369.330.454.700	26.6349576
	2019	384.979.296.768	26.6764554
	2020	419.363.320.517	26.7620035
	2021	408.635.274.883	26.7360888
Kabupaten Karanganyar	2017	415.142.563.370	26.7518878
	2018	343.156.469.167	26.5614524
	2019	387.763.013.239	26.6836602
	2020	384.682.993.533	26.6756854
	2021	426.649.591.412	26.7792289
Kabupaten Kebumen	2017	443.608.862.461	26.8182091
	2018	352.047.092.282	26.5870308
	2019	409.163.433.330	26.7373805
	2020	403.025.963.783	26.7222668
	2021	472.017.087.115	26.8802810
Kabupaten Kendal	2017	404.978.613.972	26.7271001
	2018	335.892.237.024	26.5400562
	2019	350.500.849.956	26.5826290
	2020	356.753.593.703	26.6003112
	2021	439.197.987.791	26.8082161
Kabupaten Klaten	2017	371.718.439.306	26.6414025
	2018	395.884.244.135	26.7043877
	2019	311.648.401.655	26.4651415
	2020	329.963.261.898	26.5222472
	2021	315.304.009.782	26.4768031
	2017	366.031.203.778	26.6259844

Nama Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	LN_PAD
		X1	
Kabupaten Kudus	2018	337.364.609.424	26.5444301
	2019	343.824.122.868	26.5633961
	2020	383.892.971.961	26.6736296
	2021	507.167.074.775	26.9521063
	2017	403.561.238.310	26.7235941
Kabupaten Magelang	2018	325.089.093.092	26.5073651
	2019	417.178.099.961	26.7567791
	2020	329.769.193.224	26.5216588
	2021	375.378.465.373	26.6512006
	2017	449.821.345.800	26.8321163
Kabupaten Pati	2018	384.041.846.939	26.6740174
	2019	363.997.151.178	26.6204119
	2020	371.708.005.192	26.6413745
	2021	388.644.537.358	26.6859310
	2017	305.394.299.061	26.4448696
Kabupaten Pekalongan	2018	311.288.143.682	26.4639848
	2019	341.344.415.575	26.5561578
	2020	341.901.469.549	26.5577884
	2021	346.599.468.113	26.5714357
	2017	355.859.003.583	26.5978004
Kabupaten Purbalingga	2018	282.679.019.517	26.3675779
	2019	305.996.806.188	26.4468405
	2020	331.618.688.781	26.5272516
	2021	377.882.022.370	26.6578479
	2017	298.606.494.653	26.4223925
Kabupaten Purworejo	2018	286.971.590.024	26.3826491
	2019	280.396.155.600	26.3594693
	2020	304.800.202.905	26.4429223
	2021	438.264.776.270	26.8060891
	2017	300.319.284.807	26.4281120
Kabupaten Rembang	2018	296.676.436.263	26.4159079
	2019	308.445.489.137	26.4548110
	2020	326.670.124.350	26.5122167
	2021	404.100.646.579	26.7249298
	2017	417.417.848.831	26.7573536
Kabupaten Semarang	2018	383.475.678.134	26.6725420
	2019	429.011.081.257	26.7847486

Nama Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	LN_PAD
		X1	
	2020	442.528.167.477	26.8157700
	2021	575.748.297.606	27.0789364
Kabupaten Sragen	2017	404.569.404.722	26.7260891
	2018	334.303.284.344	26.5353145
	2019	368.325.799.601	26.6322337
	2020	394.464.906.604	26.7007960
	2021	537.265.408.211	27.0097581
Kabupaten Sukoharjo	2017	464.567.409.857	26.8643725
	2018	433.485.481.219	26.7951241
	2019	458.742.223.869	26.8517543
	2020	469.540.567.890	26.8750205
	2021	528.354.094.902	26.9930325
Kabupaten Tegal	2017	375.531.165.351	26.6516073
	2018	372.282.676.055	26.6429193
	2019	436.003.392.413	26.8009159
	2020	439.931.567.174	26.8098850
	2021	591.004.284.313	27.1050891
Kabupaten Temanggung	2017	308.466.748.340	26.4548799
	2018	252.019.934.778	26.2527740
	2019	278.313.775.793	26.3520150
	2020	307.488.084.365	26.4517022
	2021	363.128.342.571	26.6180222
Kabupaten Wonogiri	2017	333.840.434.905	26.5339290
	2018	269.032.427.619	26.3180978
	2019	287.221.631.013	26.3835200
	2020	274.293.129.950	26.3374632
	2021	241.300.072.883	26.2093071
Kabupaten Wonosobo	2017	228.017.473.938	26.1526881
	2018	226.819.478.601	26.1474203
	2019	238.371.743.591	26.1970972
	2020	251.724.091.045	26.2515994
	2021	339.745.535.241	26.5514627
Kota Magelang	2017	233.557.714.356	26.1766951
	2018	249.877.424.347	26.2442363
	2019	273.582.932.151	26.3348706
	2020	290.756.816.510	26.3957531
	2021	319.391.277.825	26.4896828

Nama Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	LN_PAD
		X1	
Kota Pekalongan	2017	192.002.871.181	25.9807762
	2018	179.224.408.698	25.9119045
	2019	212.777.435.294	26.0835126
	2020	229.867.935.360	26.1607708
	2021	252.037.004.472	26.2528418
Kota Salatiga	2017	220.243.361.132	26.1179990
	2018	208.926.057.032	26.0652462
	2019	236.086.898.372	26.1874658
	2020	219.539.400.332	26.1147976
	2021	280.684.937.797	26.3604987
Kota Semarang	2017	1.791.886.378.674	28.2142900
	2018	1.821.274.103.250	28.2305574
	2019	2.006.333.418.588	28.3273300
	2020	2.024.537.808.307	28.3363625
	2021	2.385.948.066.862	28.5006177
Kota Tegal	2017	306.830.656.135	26.4495618
	2018	275.021.448.594	26.3401149
	2019	285.575.788.984	26.3777733
	2020	266.580.982.102	26.3089439
	2021	308.116.840.289	26.4537449

Lampiran 4 Data dana perimbangan sebelum dan sesudah di LN

Nama Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	LN_DP
Kabupaten Banjarnegara	2017	1.421.498.445.787	27.9827327
	2018	1.354.080.374.738	27.9341436
	2019	1.345.282.274.537	27.9276250
	2020	1.238.071.740.603	27.8445762
	2021	1.251.747.015.765	27.8555613
kabupaten Banyumas	2017	1.868.367.395.431	28.2560861
	2018	1.894.413.016.142	28.2699302
	2019	1.940.352.355.633	28.2938907
	2020	1.854.294.495.150	28.2485254
	2021	1.881.829.664.924	28.2632656
Kabupaten Batang	2017	993.464.937.327	27.6244646
	2018	1.048.707.118.663	27.6785792
	2019	1.090.972.263.503	27.7180904
	2020	1.008.861.912.901	27.6398440
	2021	1.068.002.486.995	27.6968112
Kabupaten Blora	2017	1.348.442.240.943	27.9299711
	2018	1.375.550.409.408	27.9498751
	2019	1.441.716.460.262	27.9968555
	2020	1.259.239.750.269	27.8615293
	2021	1.406.481.782.693	27.9721125
Kabupaten Boyolali	2017	1.354.438.480.868	27.9344081
	2018	1.438.528.619.300	27.9946419
	2019	1.436.635.314.225	27.9933249
	2020	1.356.374.607.571	27.9358365
	2021	1.398.980.791.226	27.9667651
Kabupaten Brebes	2017	1.754.591.823.619	28.1932574
	2018	1.753.057.931.104	28.1923828
	2019	1.876.097.637.787	28.2602150
	2020	1.708.279.450.821	28.1665078
	2021	1.722.570.229.031	28.1748386
Kabupaten Cilacap	2017	1.874.953.083.082	28.2596048
	2018	1.874.260.346.332	28.2592352
	2019	1.928.670.863.364	28.2878522
	2020	1.757.591.202.654	28.1949654
	2021	1.787.763.401.074	28.2119865
Kabupaten Demak	2017	1.230.548.143.827	27.8384808
	2018	1.205.186.810.394	27.8176557

Nama Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	LN_DP
	2019	1.274.017.335.391	27.8731963
	2020	1.181.046.800.246	27.7974223
	2021	1.230.848.488.721	27.8387249
Kabupaten Grobogan	2017	1.522.597.859.511	28.0514391
	2018	1.520.822.495.760	28.0502724
	2019	1.563.813.913.035	28.0781488
	2020	1.444.279.746.734	27.9986319
	2021	1.508.851.762.438	28.0423701
Kabupaten Jepara	2017	1.316.698.615.037	27.9061487
	2018	1.339.634.292.620	27.9234178
	2019	1.393.154.748.566	27.9625919
	2020	1.280.105.479.190	27.8779636
	2021	1.362.972.121.042	27.9406888
Kabupaten Karanganyar	2017	1.271.470.088.847	27.8711949
	2018	1.325.732.297.703	27.9129861
	2019	1.358.762.557.968	27.9375955
	2020	1.247.805.559.571	27.8524076
	2021	1.265.238.854.296	27.8662820
Kabupaten Kebumen	2017	1.712.419.381.173	28.1689283
	2018	1.654.135.303.906	28.1342995
	2019	1.688.387.155.843	28.1547948
	2020	1.624.225.405.094	28.1160521
	2021	1.607.599.153.080	28.1057630
Kabupaten Kendal	2017	1.258.083.866.285	27.8606109
	2018	1.299.802.798.970	27.8932337
	2019	1.348.372.347.984	27.9299193
	2020	1.228.541.096.335	27.8368485
	2021	1.293.961.426.712	27.8887295
Kabupaten Klaten	2017	1.624.715.625.119	28.1163539
	2018	1.652.127.767.661	28.1330851
	2019	1.666.073.637.378	28.1414909
	2020	1.516.494.102.076	28.0474223
	2021	1.531.837.675.983	28.0574892
Kabupaten Kudus	2017	1.310.924.033.469	27.9017534
	2018	1.281.771.374.568	27.8792641
	2019	1.298.060.004.624	27.8918920
	2020	1.183.590.147.772	27.7995734
	2021	1.239.890.567.326	27.8460442

Nama Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	LN_DP
Kabupaten Magelang	2017	1.161.979.715.539	27.7811463
	2018	1.398.132.841.570	27.9661588
	2019	1.452.804.059.102	28.0045166
	2020	1.331.514.071.778	27.9173378
	2021	1.378.481.533.695	27.9520037
Kabupaten Pati	2017	1.689.030.336.220	28.1551757
	2018	1.288.217.218.488	27.8842804
	2019	1.637.460.890.857	28.1241679
	2020	1.505.063.848.568	28.0398564
	2021	1.519.385.725.982	28.0493272
Kabupaten Pekalongan	2017	1.282.878.563.801	27.8801275
	2018	1.288.217.218.488	27.8842804
	2019	1.321.954.447.227	27.9101324
	2020	1.206.915.407.953	27.8190890
	2021	1.208.036.399.361	27.8200173
Kabupaten Purbalingga	2017	1.242.607.095.713	27.8482328
	2018	1.240.574.231.875	27.8465955
	2019	1.271.720.206.430	27.8713916
	2020	1.144.405.027.431	27.7659060
	2021	1.181.252.057.178	27.7975961
Kabupaten Purworejo	2017	1.207.260.306.714	27.8193747
	2018	1.247.436.685.096	27.8521119
	2019	1.292.431.347.427	27.8875463
	2020	1.225.319.536.635	27.8342228
	2021	1.269.473.877.712	27.8696237
Kabupaten Rembang	2017	927.645.131.515	27.5559151
	2018	902.171.379.111	27.5280703
	2019	1.051.964.945.792	27.6816809
	2020	1.012.352.994.244	27.6432984
	2021	1.031.432.921.909	27.6619701
Kabupaten Semarang	2017	1.283.938.368.800	27.8809533
	2018	1.307.508.472.787	27.8991445
	2019	1.351.090.467.972	27.9319331
	2020	1.240.480.579.637	27.8465200
	2021	1.264.272.822.840	27.8655182
Kabupaten Sragen	2017	1.401.311.726.811	27.9684299
	2018	1.396.508.762.647	27.9649965
	2019	1.431.291.179.984	27.9895981

Nama Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	LN_DP
	2020	1.351.654.579.917	27.9323506
	2021	1.324.329.482.026	27.9119274
	2017	1.217.877.693.551	27.8281309
Kabupaten Sukoharjo	2018	1.219.811.099.454	27.8297171
	2019	1.248.563.458.768	27.8530148
	2020	1.163.627.289.398	27.7825632
	2021	1.151.058.014.075	27.7717026
	2017	1.505.671.807.702	28.0402603
Kabupaten Tegal	2018	1.513.203.330.274	28.0452499
	2019	1.586.668.848.339	28.0926579
	2020	1.477.714.812.445	28.0215180
	2021	1.533.598.537.942	28.0586381
	2017	1.077.448.076.741	27.7056165
Kabupaten Temanggung	2018	1.069.110.356.426	27.6978480
	2019	1.133.246.263.266	27.7561074
	2020	1.046.567.778.773	27.6765371
	2021	1.120.897.599.379	27.7451509
	2017	1.520.105.622.888	28.0498009
Kabupaten Wonogiri	2018	1.532.139.685.475	28.0576864
	2019	1.594.457.129.912	28.0975544
	2020	1.451.651.540.186	28.0037230
	2021	1.486.802.858.050	28.0276492
	2017	1.133.217.018.646	27.7560816
Kabupaten Wonosobo	2018	1.139.805.205.659	27.7618785
	2019	1.236.562.229.419	27.8433562
	2020	1.123.108.003.017	27.7471210
	2021	1.150.595.572.828	27.7713008
	2017	553.115.007.612	27.0388318
Kota Magelang	2018	570.455.641.253	27.0697012
	2019	574.099.278.956	27.0760682
	2020	525.575.219.057	26.9877592
	2021	530.420.759.133	26.9969364
	2017	586.158.869.314	27.0968567
Kota Pekalongan	2018	586.379.794.858	27.0972335
	2019	610.332.820.948	27.1372703
	2020	567.310.188.409	27.0641721
	2021	607.835.271.117	27.1331697
		2017	593.098.550.929

Nama Kabupaten	Tahun	Dana Perimbangan (Rp)	LN_DP
Kota Salatiga	2018	889.992.411.250	27.5144788
	2019	569.354.886.045	27.0677698
	2020	522.042.585.441	26.9810150
	2021	534.246.583.063	27.0041233
Kota Semarang	2017	1.425.982.183.798	27.9858819
	2018	1.438.790.841.076	27.9948242
	2019	1.738.443.043.620	28.1840110
	2020	1.669.101.931.826	28.1433068
	2021	1.699.819.686.103	28.1615433
Kota Tegal	2017	644.940.136.542	27.1924233
	2018	602.567.259.369	27.1244651
	2019	641.682.768.016	27.1873599
	2020	623.096.507.712	27.1579673
	2021	598.207.554.016	27.1172036

Lampiran 5 total aset sebelum dan sesudah di LN

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	LN (Total Aset)
Kabupaten Banjarnegara	2017	4.126.775.235.841	29.048517
	2018	4.355.751.220.425	29.102518
	2019	4.469.370.847.873	29.128269
	2020	4.528.919.724.975	29.141505
	2021	4.611.184.734.617	29.159506
Kabupaten banyumas	2017	5.463.777.382.017	29.329161
	2018	6.419.865.052.453	29.490418
	2019	6.226.652.415.512	29.459860
	2020	6.540.515.839.032	29.509037
	2021	7.258.283.031.630	29.613164
Kabupaten batang	2017	2.403.414.307.811	28.507911
	2018	2.511.746.350.765	28.551999
	2019	2.664.373.528.271	28.610990
	2020	2.909.762.489.944	28.699093
	2021	3.035.062.150.559	28.741253
Kabupaten Blora	2017	2.546.335.225.938	28.565676
	2018	2.916.854.233.298	28.701527
	2019	3.362.562.896.873	28.843725
	2020	3.382.901.824.152	28.849755
	2021	3.536.211.050.648	28.894077
Kabupaten Boyolali	2017	2.613.993.025.493	28.591900
	2018	3.116.090.963.844	28.767600
	2019	3.770.144.077.202	28.958134
	2020	4.227.690.989.734	29.072677
	2021	4.658.596.971.686	29.169735
Kabupaten Brebes	2017	3.469.695.842.864	28.875088
	2018	3.366.883.430.103	28.845009
	2019	4.187.462.596.274	29.063116
	2020	3.740.761.434.711	28.950310
	2021	3.836.478.619.191	28.975576
Kabupaten Cilacap	2017	3.873.602.950.205	28.985206
	2018	4.590.474.285.434	29.155004
	2019	5.735.055.789.650	29.377619
	2020	6.047.267.120.679	29.430628
	2021	6.345.078.297.174	29.478701
Kabupaten Demak	2017	4.927.032.170.221	29.225758
	2018	5.084.647.496.851	29.257247

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	LN (Total Aset)
	2019	5.450.473.201.190	29.326724
	2020	5.697.120.718.057	29.370982
	2021	5.914.642.693.556	29.408452
Kabupaten Grobogan	2017	2.827.558.507.349	28.670435
	2018	3.504.789.426.758	28.885152
	2019	3.642.816.444.594	28.923778
	2020	3.771.022.502.288	28.958367
	2021	4.133.213.033.678	29.050076
Kabupaten Jepara	2017	5.886.321.483.841	29.403652
	2018	6.132.256.105.267	29.444584
	2019	6.496.679.937.377	29.502312
	2020	6.626.878.048.524	29.522155
	2021	6.674.428.413.014	29.529305
Kabupaten Karanganyar	2017	2.916.448.445.711	28.701388
	2018	3.190.931.038.152	28.791334
	2019	3.476.942.970.374	28.877175
	2020	4.422.303.404.841	29.117682
	2021	4.882.484.122.308	29.216675
Kabupaten Kebumen	2017	4.409.902.555.258	29.114874
	2018	2.548.688.282.913	28.566600
	2019	4.482.323.838.554	29.131163
	2020	4.525.738.172.682	29.140802
	2021	4.678.346.895.120	29.173966
Kabupaten Kendal	2017	3.015.473.983.604	28.734778
	2018	3.081.268.497.841	28.756362
	2019	3.026.908.855.357	28.738563
	2020	3.130.779.619.644	28.772303
	2021	3.626.991.028.095	28.919425
Kabupaten Klaten	2017	3.726.733.115.067	28.946553
	2018	4.001.324.130.418	29.017646
	2019	4.157.398.988.909	29.055911
	2020	3.566.777.871.038	28.902684
	2021	3.515.210.592.463	28.888121
Kabupaten Kudus	2017	4.006.126.399.735	29.018846
	2018	4.159.213.413.942	29.056347
	2019	4.468.531.280.044	29.128081
	2020	4.670.496.301.414	29.172286
	2021	4.851.006.407.986	29.210207

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	LN (Total Aset)
Kabupaten Magelang	2017	3.019.208.420.028	28.736016
	2018	3.141.760.777.818	28.775805
	2019	3.270.629.440.572	28.816004
	2020	3.429.577.837.888	28.863458
	2021	3.597.390.329.880	28.911230
Kabupaten Pati	2017	6.006.822.341.817	29.423917
	2018	6.190.923.149.283	29.454105
	2019	6.349.754.615.979	29.479437
	2020	6.254.897.635.666	29.464386
	2021	6.356.447.372.037	29.480491
Kabupaten Pekalongan	2017	2.469.666.568.415	28.535104
	2018	2.763.481.985.690	28.647513
	2019	3.020.680.906.818	28.736503
	2020	3.066.064.901.782	28.751416
	2021	3.140.697.646.888	28.775466
Kabupaten Purbalingga	2017	2.406.468.280.774	28.509181
	2018	2.621.915.743.198	28.594926
	2019	2.846.328.687.092	28.677051
	2020	2.769.994.111.890	28.649866
	2021	2.857.441.202.742	28.680948
Kabupaten Purworejo	2017	2.588.956.121.375	28.582276
	2018	2.772.960.299.931	28.650937
	2019	2.987.231.520.048	28.725368
	2020	3.108.457.930.732	28.765148
	2021	3.303.359.268.867	28.825961
Kabupaten Rembang	2017	1.699.744.280.051	28.161499
	2018	2.083.375.254.651	28.365010
	2019	2.143.033.080.689	28.393243
	2020	2.346.462.043.810	28.483930
	2021	2.504.076.268.459	28.548941
Kabupaten Semarang	2017	3.112.499.506.159	28.766447
	2018	4.381.254.462.290	29.108356
	2019	4.689.787.427.166	29.176408
	2020	4.888.861.215.817	29.217981
	2021	5.297.004.928.246	29.298163
Kabupaten Sragen	2017	2.906.083.541.960	28.697827
	2018	3.374.697.292.758	28.847327
	2019	3.941.848.384.832	29.002671

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	LN (Total Aset)
	2020	4.087.577.565.236	29.038974
	2021	4.223.594.001.345	29.071708
Kabupaten Sukoharjo	2017	4.503.212.327.840	29.135812
	2018	4.738.164.776.816	29.186671
	2019	5.194.655.435.894	29.278651
	2020	5.674.969.987.939	29.367086
	2021	6.298.329.078.066	29.471305
Kabupaten Tegal	2017	2.991.069.237.986	28.726652
	2018	3.184.190.479.588	28.789219
	2019	3.377.567.475.085	28.848177
	2020	3.604.540.958.067	28.913216
	2021	3.819.895.903.187	28.971244
Kabupaten Temanggung	2017	2.943.103.837.806	28.710486
	2018	3.104.748.410.142	28.763954
	2019	3.240.096.678.946	28.806624
	2020	3.184.697.915.399	28.789379
	2021	3.420.435.895.674	28.860789
Kabupaten Wonogiri	2017	3.196.412.795.233	28.793050
	2018	3.441.897.165.791	28.867044
	2019	3.740.376.254.030	28.950207
	2020	3.821.069.295.193	28.971551
	2021	3.911.948.544.251	28.995057
Kabupaten Wonosobo	2017	2.679.420.928.730	28.616622
	2018	3.070.057.342.570	28.752717
	2019	3.390.531.356.578	28.852008
	2020	3.441.342.186.114	28.866883
	2021	3.761.876.565.856	28.955939
Kota Magelang	2017	3.579.209.910.129	28.906163
	2018	3.865.401.096.564	28.983087
	2019	4.012.816.686.651	29.020515
	2020	4.160.262.610.517	29.056599
	2021	4.337.393.562.510	29.098295
Kota Pekalongan	2017	2.311.166.310.884	28.468773
	2018	2.463.049.418.792	28.532421
	2019	2.856.674.222.675	28.680679
	2020	2.912.917.451.388	28.700176
	2021	3.048.941.837.080	28.745816
Kota Salatiga	2017	3.034.424.879.879	28.741043

Nama Kabupaten	Tahun	Total Aset (Rp)	LN (Total Aset)
	2018	3.112.709.787.205	28.766515
	2019	3.072.155.684.616	28.753401
	2020	3.122.697.428.676	28.769718
	2021	3.200.391.773.223	28.794294
Kota Semarang	2017	30.040.633.244.390	31.033572
	2018	30.970.860.367.210	31.064068
	2019	18.159.413.566.476	30.530210
	2020	21.003.912.081.270	30.675730
	2021	21.533.658.423.314	30.700638
Kota Tegal	2017	2.264.247.290.378	28.448263
	2018	2.402.980.382.890	28.507731
	2019	2.417.612.856.682	28.513802
	2020	2.396.957.279.062	28.505221
	2021	2.453.865.023.296	28.528685

Lampiran 6 data perhitungan leverage

Kabupaten	Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Leverage (utang/aset)
Kab Banjarnegara	2017	15.501.264.615	4.126.775.235.841	0.003756
	2018	14.847.764.458	4.355.751.220.425	0.003409
	2019	27.892.413.417	4.469.370.847.873	0.006241
	2020	21.558.235.704	4.528.919.724.975	0.004760
	2021	24.306.773.816	4.611.184.734.617	0.005271
Kab Banyumas	2017	46.663.426.452	5.463.777.382.017	0.008541
	2018	47.584.450.428	6.419.865.052.453	0.007412
	2019	48.022.508.588	6.226.652.415.512	0.007712
	2020	53.745.484.966	6.540.515.839.032	0.008217
	2021	226.020.632.393	7.258.283.031.630	0.031140
Kab Batang	2017	39.803.243.253	2.403.414.307.811	0.016561
	2018	36.377.284.647	2.511.746.350.765	0.014483
	2019	61.873.712.130	2.664.373.528.271	0.023223
	2020	65.237.751.266	2.909.762.489.944	0.022420
	2021	53.052.796.430	3.035.062.150.559	0.017480
Kab Blora	2017	14.386.404.304	2.546.335.225.938	0.005650
	2018	26.045.021.906	2.916.854.233.298	0.008929
	2019	38.147.273.422	3.362.562.896.873	0.011345
	2020	27.802.849.357	3.382.901.824.152	0.008219
	2021	35.472.435.128	3.536.211.050.648	0.010031
Kab Boyolali	2017	26.208.414.686	2.613.993.025.493	0.010026
	2018	31.740.066.977	3.116.090.963.844	0.010186
	2019	25.922.007.639	3.770.144.077.202	0.006876
	2020	31.048.552.796	4.227.690.989.734	0.007344
	2021	29.497.830.796	4.658.596.971.686	0.006332
Kab Brebes	2017	61.079.587.923	3.469.695.842.864	0.017604
	2018	61.148.270.093	3.366.883.430.103	0.018162
	2019	76.124.611.932	4.187.462.596.274	0.018179
	2020	66.089.337.137	3.740.761.434.711	0.017667
	2021	27.054.183.626	3.836.478.619.191	0.007052
Kab Cilacap	2017	28.409.528.437	3.873.602.950.205	0.007334
	2018	39.611.320.460	4.590.474.285.434	0.008629
	2019	46.031.066.708	5.735.055.789.650	0.008026
	2020	31.710.226.076	6.047.267.120.679	0.005244
	2021	63.918.905.131	6.345.078.297.174	0.010074
Kab DemaK	2017	17.948.740.505	4.927.032.170.221	0.003643

Kabupaten	Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Leverage (utang/aset)
	2018	23.193.060.087	5.084.647.496.851	0.004561
	2019	23.882.389.929	5.450.473.201.190	0.004382
	2020	16.183.319.247	5.697.120.718.057	0.002841
	2021	35.012.322.028	5.914.642.693.556	0.005920
Kab Grobogan	2017	215.917.243.467	2.827.558.507.349	0.076362
	2018	158.276.603.167	3.504.789.426.758	0.045160
	2019	97.264.860.015	3.642.816.444.594	0.026700
	2020	100.918.982.686	3.771.022.502.288	0.026762
	2021	25.801.938.073	4.133.213.033.678	0.006243
Kab Jepara	2017	47.624.914.801	5.886.321.483.841	0.008091
	2018	48.907.644.897	6.132.256.105.267	0.007975
	2019	53.330.075.629	6.496.679.937.377	0.008209
	2020	48.248.863.904	6.626.878.048.524	0.007281
	2021	45.133.876.471	6.674.428.413.014	0.006762
Kab Karanganyar	2017	10.354.656.976	2.916.448.445.711	0.003550
	2018	12.567.654.586	3.190.931.038.152	0.003939
	2019	77.487.001.680	3.476.942.970.374	0.022286
	2020	59.694.366.841	4.422.303.404.841	0.013498
	2021	69.520.026.740	4.882.484.122.308	0.014239
Kab Kebumen	2017	15.408.491.439	4.409.902.555.258	0.003494
	2018	19.470.388.884	2.548.688.282.913	0.007639
	2019	28.013.032.839	4.482.323.838.554	0.006250
	2020	41.790.047.964	4.525.738.172.682	0.009234
	2021	63.997.463.892	4.678.346.895.120	0.013680
Kab Kendal	2017	19.972.282.878	3.015.473.983.604	0.006623
	2018	22.583.391.149	3.081.268.497.841	0.007329
	2019	23.132.800.671	3.026.908.855.357	0.007642
	2020	48.079.491.470	3.130.779.619.644	0.015357
	2021	25.264.383.021	3.626.991.028.095	0.006966
Kab Klaten	2017	12.014.878.813	3.726.733.115.067	0.003224
	2018	14.184.933.215	4.001.324.130.418	0.003545
	2019	14.356.397.757	4.157.398.988.909	0.003453
	2020	20.876.092.289	3.566.777.871.038	0.005853
	2021	8.335.992.845	3.515.210.592.463	0.002371
Kab Kudus	2017	27.166.957.795	4.006.126.399.735	0.006781
	2018	26.884.809.344	4.159.213.413.942	0.006464
	2019	45.694.093.284	4.468.531.280.044	0.010226

Kabupaten	Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Leverage (utang/aset)
	2020	39.526.372.676	4.670.496.301.414	0.008463
	2021	33.480.798.376	4.851.006.407.986	0.006902
Kab Magelang	2017	13.856.732.896	3.019.208.420.028	0.004590
	2018	19.717.148.141	3.141.760.777.818	0.006276
	2019	13.672.463.777	3.270.629.440.572	0.004180
	2020	21.102.659.627	3.429.577.837.888	0.006153
	2021	37.025.724.121	3.597.390.329.880	0.010292
Kab Pati	2017	13.390.891.304	6.006.822.341.817	0.002229
	2018	15.271.698.380	6.190.923.149.283	0.002467
	2019	15.930.310.780	6.349.754.615.979	0.002509
	2020	17.505.067.742	6.254.897.635.666	0.002799
	2021	40.904.701.137	6.356.447.372.037	0.006435
Kab Pekalongan	2017	24.510.703.563	2.469.666.568.415	0.009925
	2018	27.308.927.798	2.763.481.985.690	0.009882
	2019	28.102.289.578	3.020.680.906.818	0.009303
	2020	54.362.781.581	3.066.064.901.782	0.017730
	2021	20.070.938.664	3.140.697.646.888	0.006391
Kab Purbalingga	2017	42.466.785.223	2.406.468.280.774	0.017647
	2018	39.259.348.356	2.621.915.743.198	0.014974
	2019	24.342.556.131	2.846.328.687.092	0.008552
	2020	40.848.285.164	2.769.994.111.890	0.014747
	2021	37.443.869.103	2.857.441.202.742	0.013104
Kab Purworejo	2017	8.432.879.373	2.588.956.121.375	0.003257
	2018	22.869.355.629	2.772.960.299.931	0.008247
	2019	27.985.586.663	2.987.231.520.048	0.009368
	2020	29.886.080.519	3.108.457.930.732	0.009614
	2021	40.729.600.863	3.303.359.268.867	0.012330
Kab Rembang	2017	38.778.353.764	1.699.744.280.051	0.022814
	2018	58.008.769.101	2.083.375.254.651	0.027844
	2019	70.907.184.825	2.143.033.080.689	0.033087
	2020	53.356.985.646	2.346.462.043.810	0.022739
	2021	30.243.474.358	2.504.076.268.459	0.012078
Kab Semarang	2017	16.078.034.786	3.112.499.506.159	0.005166
	2018	27.090.182.656	4.381.254.462.290	0.006183
	2019	36.708.575.198	4.689.787.427.166	0.007827
	2020	39.346.280.871	4.888.861.215.817	0.008048
	2021	72.861.576.581	5.297.004.928.246	0.013755

Kabupaten	Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Leverage (utang/aset)
Kab Sragen	2017	17.387.582.362	2.906.083.541.960	0.005983
	2018	219.450.361.358	3.374.697.292.758	0.065028
	2019	122.393.153.273	3.941.848.384.832	0.031050
	2020	37.550.159.968	4.087.577.565.236	0.009186
	2021	34.106.781.852	4.223.594.001.345	0.008075
Kab Sukoharjo	2017	12.041.825.583	4.503.212.327.840	0.002674
	2018	12.842.782.453	4.738.164.776.816	0.002710
	2019	23.208.394.593	5.194.655.435.894	0.004468
	2020	27.708.484.523	5.674.969.987.939	0.004883
	2021	41.424.816.501	6.298.329.078.066	0.006577
Kab Tegal	2017	34.374.096.019	2.991.069.237.986	0.011492
	2018	32.495.011.851	3.184.190.479.588	0.010205
	2019	35.259.186.635	3.377.567.475.085	0.010439
	2020	37.522.234.509	3.604.540.958.067	0.010410
	2021	42.809.058.082	3.819.895.903.187	0.011207
Kab Temanggung	2017	103.459.899.423	2.943.103.837.806	0.035153
	2018	52.839.051.280	3.104.748.410.142	0.017019
	2019	54.189.755.843	3.240.096.678.946	0.016725
	2020	46.722.714.827	3.184.697.915.399	0.014671
	2021	67.494.782.277	3.420.435.895.674	0.019733
Kab Wonogiri	2017	25.089.302.968	3.196.412.795.233	0.007849
	2018	82.106.190.017	3.441.897.165.791	0.023855
	2019	25.954.565.055	3.740.376.254.030	0.006939
	2020	29.383.744.143	3.821.069.295.193	0.007690
	2021	32.890.783.258	3.911.948.544.251	0.008408
Kab Wonosobo	2017	3.392.678.852	228.017.473.938	0.014879
	2018	9.985.534.071	226.819.478.601	0.044024
	2019	7.169.175.220	238.371.743.591	0.030076
	2020	15.225.804.316	251.724.091.045	0.060486
	2021	56.271.664.968	339.745.535.241	0.165629
Kota Magelang	2017	1.768.768.797	3.579.209.910.129	0.000494
	2018	2.062.128.961	3.865.401.096.564	0.000533
	2019	1.942.887.272	4.012.816.686.651	0.000484
	2020	2.475.296.228	4.160.262.610.517	0.000595
	2021	2.653.417.161	4.337.393.562.510	0.000612
Kota Pekalongan	2017	13.218.307.119	2.311.166.310.884	0.005719
	2018	15.542.034.640	2.463.049.418.792	0.006310

Kabupaten	Tahun	Total Utang (Rp)	Total Aset (Rp)	Leverage (utang/aset)
	2019	25.841.538.443	2.856.674.222.675	0.009046
	2020	17.678.074.030	2.912.917.451.388	0.006069
	2021	22.304.165.769	3.048.941.837.080	0.007315
Kota Salatiga	2017	12.861.897.914	3.034.424.879.879	0.004239
	2018	24.337.998.030	3.112.709.787.205	0.007819
	2019	18.505.893.340	3.072.155.684.616	0.006024
	2020	35.120.126.433	3.122.697.428.676	0.011247
	2021	31.685.527.286	3.200.391.773.223	0.009901
Kota Semarang	2017	55.520.884.775	30.040.633.244.390	0.001848
	2018	78.271.347.952	30.970.860.367.210	0.002527
	2019	75.442.237.753	18.159.413.566.476	0.004154
	2020	111.173.513.013	21.003.912.081.270	0.005293
	2021	115.236.492.308	21.533.658.423.314	0.005351
Kota Tegal	2017	25.495.430.842	2.264.247.290.378	0.011260
	2018	46.855.414.772	2.402.980.382.890	0.019499
	2019	32.689.665.441	2.417.612.856.682	0.013521
	2020	44.143.784.410	2.396.957.279.062	0.018417
	2021	64.219.226.370	2.453.865.023.296	0.026171

Lampiran 7 data perhitungan rasio kemandirian

Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KK
Kab Banjarnegara	2017	297.485.382.003	2.168.175.161.490	0.137205
	2018	235.994.436.137	2.074.653.161.695	0.113751
	2019	257.700.650.110	2.105.990.272.337	0.122366
	2020	238.638.994.321	1.994.604.106.561	0.119642
	2021	313.830.623.336	2.086.059.742.250	0.150442
Kab Banyumas	2017	619.701.627.380	3.221.258.052.894	0.192379
	2018	648.326.914.035	3.265.926.651.861	0.198512
	2019	686.805.512.326	3.434.925.995.303	0.199948
	2020	668.211.148.299	3.330.186.788.242	0.200653
	2021	761.991.440.173	3.487.722.900.410	0.218478
Kab Batang	2017	219.807.128.307	1.566.154.720.814	0.140348
	2018	237.547.973.048	1.701.877.299.154	0.139580
	2019	245.836.087.092	1.769.958.202.416	0.138894
	2020	257.422.866.095	1.733.087.893.276	0.148534
	2021	322.789.372.918	1.821.822.580.995	0.177179
Kab Blora	2017	280.042.019.102	2.013.829.444.230	0.139059
	2018	203.182.795.054	2.120.671.434.967	0.095811
	2019	246.863.066.484	2.240.970.020.181	0.110159
	2020	299.687.660.301	2.127.946.961.535	0.140834
	2021	326.770.477.077	2.227.065.270.461	0.146727
Kab Boyolali	2017	388.014.897.386	2.176.496.270.254	0.178275
	2018	342.957.213.726	2.227.780.710.062	0.153946
	2019	395.431.863.402	2.357.487.210.573	0.167734
	2020	451.543.582.894	2.382.403.220.150	0.189533
	2021	514.970.001.434	2.430.235.208.978	0.211901
Kab Brebes	2017	523.660.773.732	2.856.934.060.544	0.183295
	2018	346.907.972.510	2.854.043.939.110	0.121550
	2019	379.091.298.714	3.096.826.845.150	0.122413
	2020	392.541.730.819	3.008.370.717.507	0.130483
	2021	518.511.128.705	3.162.140.424.372	0.163975
Kab Cilacap	2017	648.091.381.096	3.067.274.791.140	0.211292
	2018	527.577.740.281	3.072.112.464.787	0.171731
	2019	574.276.795.303	3.282.797.966.311	0.174935
	2020	591.343.787.160	3.152.402.455.712	0.187585
	2021	739.133.833.863	3.334.300.290.656	0.221676
Kab Demak	2017	309.612.407.201	2.060.864.280.423	0.150234

Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KK
	2018	342.324.870.245	2.143.306.258.595	0.159718
	2019	407.400.540.995	2.362.016.248.793	0.172480
	2020	439.694.424.385	2.333.738.996.798	0.188408
	2021	445.010.135.308	2.365.244.759.686	0.188145
Kab Grobogan	2017	440.456.238.668	2.426.674.663.998	0.181506
	2018	315.743.531.675	2.439.501.618.057	0.129430
	2019	344.559.032.450	2.581.437.543.584	0.133476
	2020	350.453.524.065	2.528.884.131.946	0.138580
	2021	424.186.340.266	2.634.888.673.901	0.160988
Kab Jepara	2017	325.530.346.533	2.165.074.563.873	0.150355
	2018	369.330.454.700	2.255.843.022.157	0.163722
	2019	384.979.296.768	2.413.822.993.348	0.159489
	2020	419.363.320.517	2.315.260.399.485	0.181130
	2021	408.635.274.883	2.380.695.935.358	0.171645
Kab Karanganyar	2017	415.142.563.370	2.043.460.305.969	0.203157
	2018	343.156.469.167	2.113.929.231.663	0.162331
	2019	387.763.013.239	2.179.409.706.710	0.177921
	2020	384.682.993.533	2.121.386.179.225	0.181336
	2021	426.649.591.412	2.165.983.748.572	0.196977
Kab Kebumen	2017	443.608.862.461	2.713.113.397.677	0.163505
	2018	352.047.092.282	2.639.814.864.398	0.133361
	2019	409.163.433.330	2.818.494.983.541	0.145171
	2020	403.025.963.783	2.763.229.307.229	0.145853
	2021	472.017.087.115	2.832.035.015.733	0.166671
Kab Kendal	2017	404.978.613.972	2.047.555.046.096	0.197786
	2018	335.892.237.024	2.138.564.387.700	0.157064
	2019	350.500.849.956	2.228.384.399.855	0.157289
	2020	356.753.593.703	2.131.449.784.048	0.167376
	2021	439.197.987.791	2.300.543.641.945	0.190911
Kab Klaten	2017	371.718.439.306	2.581.515.295.917	0.143992
	2018	395.884.244.135	2.577.961.130.135	0.153565
	2019	311.648.401.655	2.689.353.252.985	0.115882
	2020	329.963.261.898	2.578.135.836.354	0.127985
	2021	315.304.009.782	2.570.037.777.373	0.122685
Kab Kudus	2017	366.031.203.778	1.983.213.078.247	0.184565
	2018	337.364.609.424	1.996.530.094.357	0.168975
	2019	343.824.122.868	2.090.430.364.413	0.164475

Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KK
	2020	383.892.971.961	2.016.176.986.239	0.190406
	2021	507.167.074.775	2.163.634.437.714	0.234405
Kab Magelang	2017	403.561.238.310	2.271.336.015.858	0.177676
	2018	325.089.093.092	2.302.190.543.616	0.141209
	2019	417.178.099.961	2.575.439.825.755	0.161983
	2020	329.769.193.224	2.380.457.680.604	0.138532
	2021	375.378.465.373	2.469.754.315.099	0.151990
Kab Pati	2017	449.821.345.800	2.769.242.943.472	0.162435
	2018	384.041.846.939	2.381.101.318.854	0.161287
	2019	363.997.151.178	2.838.881.396.181	0.128219
	2020	371.708.005.192	2.662.375.437.006	0.139615
	2021	388.644.537.358	2.725.202.350.660	0.142611
Kab Pekalongan	2017	305.394.299.061	2.067.907.851.794	0.147683
	2018	311.288.143.682	2.101.449.302.497	0.148130
	2019	341.344.415.575	2.182.770.952.456	0.156381
	2020	341.901.469.549	2.061.798.474.096	0.165827
	2021	346.599.468.113	2.078.543.512.922	0.166751
Kab Purbalingga	2017	355.859.003.583	1.957.994.897.247	0.181747
	2018	282.679.019.517	1.948.442.029.100	0.145080
	2019	305.996.806.188	2.076.658.114.142	0.147351
	2020	331.618.688.781	1.952.749.301.274	0.169821
	2021	377.882.022.370	2.054.843.644.547	0.183898
Kab Purworejo	2017	298.606.494.653	2.114.807.792.154	0.141198
	2018	286.971.590.024	2.049.784.186.054	0.140001
	2019	280.396.155.600	2.172.436.925.114	0.129070
	2020	304.800.202.905	2.166.947.747.648	0.140659
	2021	438.264.776.270	2.290.242.967.778	0.191362
Kab Rembang	2017	300.319.284.807	1.722.252.909.030	0.174376
	2018	296.676.436.263	1.785.911.075.230	0.166120
	2019	308.445.489.137	1.821.899.884.311	0.169299
	2020	326.670.124.350	1.878.325.919.915	0.173916
	2021	404.100.646.579	1.911.328.505.019	0.211424
Kab Semarang	2017	417.417.848.831	2.135.227.865.431	0.195491
	2018	383.475.678.134	2.117.416.566.804	0.181105
	2019	429.011.081.257	2.311.149.343.922	0.185627
	2020	442.528.167.477	2.211.273.524.265	0.200124
	2021	575.748.297.606	2.417.282.770.158	0.238180

Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KK
Kab Sragen	2017	404.569.404.722	2.187.032.686.896	0.184986
	2018	334.303.284.344	2.173.350.423.558	0.153819
	2019	368.325.799.601	2.300.826.069.513	0.160084
	2020	394.464.906.604	2.212.824.974.529	0.178263
	2021	537.265.408.211	2.336.721.727.716	0.229923
Sukoharjo	2017	464.567.409.857	2.055.571.033.667	0.226004
	2018	433.485.481.219	2.055.517.964.074	0.210889
	2019	458.742.223.869	2.143.687.569.516	0.213997
	2020	469.540.567.890	2.040.394.761.328	0.230122
	2021	528.354.094.902	2.119.633.370.538	0.249267
Kab Tegal	2017	375.531.165.351	2.450.766.552.130	0.153230
	2018	372.282.676.055	2.524.365.919.815	0.147476
	2019	436.003.392.413	2.755.677.484.152	0.158220
	2020	439.931.567.174	2.651.771.838.697	0.165901
	2021	591.004.284.313	2.862.559.366.052	0.206460
Kab Temanggung	2017	308.466.748.340	1.779.850.394.321	0.173310
	2018	252.019.934.778	1.731.235.867.161	0.145572
	2019	278.313.775.793	1.878.383.823.682	0.148167
	2020	307.488.084.365	1.830.848.453.347	0.167948
	2021	363.128.342.571	1.971.005.990.029	0.184235
Kab Wonogiri	2017	333.840.434.905	2.317.978.656.683	0.144022
	2018	269.032.427.619	2.513.361.796.095	0.107041
	2019	287.221.631.013	2.442.677.972.827	0.117585
	2020	274.293.129.950	2.273.678.538.635	0.120638
	2021	241.300.072.883	2.303.564.898.937	0.104751
Kab Wonosobo	2017	228.017.473.938	1.829.290.334.360	0.124648
	2018	226.819.478.601	1.851.441.024.405	0.122510
	2019	238.371.743.591	1.958.595.025.572	0.121705
	2020	251.724.091.045	1.878.995.666.418	0.133967
	2021	339.745.535.241	1.967.781.049.592	0.172654
Kota Magelang	2017	233.557.714.356	909.525.862.920	0.256791
	2018	249.877.424.347	908.089.485.909	0.275168
	2019	273.582.932.151	967.785.834.243	0.282690
	2020	290.756.816.510	946.188.761.537	0.307293
	2021	319.391.277.825	994.366.987.776	0.321201
Kota Pekalongan	2017	192.002.871.181	915.920.377.495	0.209628
	2018	179.224.408.698	905.231.572.568	0.197987

Kabupaten	Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	KK
	2019	212.777.435.294	971.624.464.121	0.218991
	2020	229.867.935.360	953.155.394.614	0.241165
	2021	252.037.004.472	966.372.557.051	0.260807
Kota Salatiga	2017	220.243.361.132	882.746.082.111	0.249498
	2018	208.926.057.032	889.992.411.250	0.234750
	2019	236.086.898.372	928.019.899.150	0.254399
	2020	219.539.400.332	890.223.683.933	0.246612
	2021	280.684.937.797	946.191.087.524	0.296647
Kota Semarang	2017	1.791.886.378.674	3.964.574.307.584	0.451974
	2018	1.821.274.103.250	4.234.394.060.362	0.430114
	2019	2.006.333.418.588	4.565.340.827.417	0.439471
	2020	2.024.537.808.307	4.400.500.838.480	0.460070
	2021	2.385.948.066.862	4.822.890.590.122	0.494713
Kota Tegal	2017	306.830.656.135	1.024.765.938.277	0.299415
	2018	275.021.448.594	987.244.236.619	0.278575
	2019	285.575.788.984	1.036.963.763.529	0.275396
	2020	266.580.982.102	1.017.915.109.373	0.261889
	2021	308.116.840.289	1.030.986.510.449	0.298856

Lampiran 8 Tabulasi data siap olah

Kabupaten	Tahun	KK	LN_PAD	LN_DP	LN_Total	LEV
		Y	X1	X2	Aset	X3
Kab Banjarnegara	2017	0.14	26.42	27.98	29.05	0.00
	2018	0.11	26.19	27.93	29.10	0.00
	2019	0.12	26.28	27.93	29.13	0.01
	2020	0.12	26.20	27.84	29.14	0.00
	2021	0.15	26.47	27.86	29.16	0.01
kab Banyumas	2017	0.19	27.15	28.26	29.33	0.01
	2018	0.20	27.20	28.27	29.49	0.01
	2019	0.20	27.26	28.29	29.46	0.01
	2020	0.20	27.23	28.25	29.51	0.01
	2021	0.22	27.36	28.26	29.61	0.03
Kab Batang	2017	0.14	26.12	27.62	28.51	0.02
	2018	0.14	26.19	27.68	28.55	0.01
	2019	0.14	26.23	27.72	28.61	0.02
	2020	0.15	26.27	27.64	28.70	0.02
	2021	0.18	26.50	27.70	28.74	0.02
Kab Blora	2017	0.14	26.36	27.93	28.57	0.01
	2018	0.10	26.04	27.95	28.70	0.01
	2019	0.11	26.23	28.00	28.84	0.01
	2020	0.14	26.43	27.86	28.85	0.01
	2021	0.15	26.51	27.97	28.89	0.01
Kab Boyolali	2017	0.18	26.68	27.93	28.59	0.01
	2018	0.15	26.56	27.99	28.77	0.01
	2019	0.17	26.70	27.99	28.96	0.01
	2020	0.19	26.84	27.94	29.07	0.01
	2021	0.21	26.97	27.97	29.17	0.01
Kab Brebes	2017	0.18	26.98	28.19	28.88	0.02
	2018	0.12	26.57	28.19	28.85	0.02
	2019	0.12	26.66	28.26	29.06	0.02
	2020	0.13	26.70	28.17	28.95	0.02
	2021	0.16	26.97	28.17	28.98	0.01
Kab Cilacap	2017	0.21	27.20	28.26	28.99	0.01
	2018	0.17	26.99	28.26	29.16	0.01
	2019	0.17	27.08	28.29	29.38	0.01
	2020	0.19	27.11	28.19	29.43	0.01
	2021	0.22	27.33	28.21	29.48	0.01

Kabupaten	Tahun	KK	LN_PAD	LN_DP	LN_Total	LEV
		Y	X1	X2	Aset X3	X4
Kab Demak	2017	0.15	26.46	27.84	29.23	0.00
	2018	0.16	26.56	27.82	29.26	0.00
	2019	0.17	26.73	27.87	29.33	0.00
	2020	0.19	26.81	27.80	29.37	0.00
	2021	0.19	26.82	27.84	29.41	0.01
Kab Grobogan	2017	0.18	26.81	28.05	28.67	0.08
	2018	0.13	26.48	28.05	28.89	0.05
	2019	0.13	26.57	28.08	28.92	0.03
	2020	0.14	26.58	28.00	28.96	0.03
	2021	0.16	26.77	28.04	29.05	0.01
Kab Jepara	2017	0.15	26.51	27.91	29.40	0.01
	2018	0.16	26.63	27.92	29.44	0.01
	2019	0.16	26.68	27.96	29.50	0.01
	2020	0.18	26.76	27.88	29.52	0.01
	2021	0.17	26.74	27.94	29.53	0.01
Kab Karanganyar	2017	0.20	26.75	27.87	28.70	0.00
	2018	0.16	26.56	27.91	28.79	0.00
	2019	0.18	26.68	27.94	28.88	0.02
	2020	0.18	26.68	27.85	29.12	0.01
	2021	0.20	26.78	27.87	29.22	0.01
Kab Kebumen	2017	0.16	26.82	28.17	29.11	0.00
	2018	0.13	26.59	28.13	28.57	0.01
	2019	0.15	26.74	28.15	29.13	0.01
	2020	0.15	26.72	28.12	29.14	0.01
	2021	0.17	26.88	28.11	29.17	0.01
Kab Kendal	2017	0.20	26.73	27.86	28.73	0.01
	2018	0.16	26.54	27.89	28.76	0.01
	2019	0.16	26.58	27.93	28.74	0.01
	2020	0.17	26.60	27.84	28.77	0.02
	2021	0.19	26.81	27.89	28.92	0.01
Kab Klaten	2017	0.14	26.64	28.12	28.95	0.00
	2018	0.15	26.70	28.13	29.02	0.00
	2019	0.12	26.47	28.14	29.06	0.00
	2020	0.13	26.52	28.05	28.90	0.01
	2021	0.12	26.48	28.06	28.89	0.00
Kab Kudus	2017	0.18	26.63	27.90	29.02	0.01

Kabupaten	Tahun	KK	LN_PAD	LN_DP	LN_Total	LEV
		Y	X1	X2	Aset X3	X4
	2018	0.17	26.54	27.88	29.06	0.01
	2019	0.16	26.56	27.89	29.13	0.01
	2020	0.19	26.67	27.80	29.17	0.01
	2021	0.23	26.95	27.85	29.21	0.01
	2017	0.18	26.72	27.78	28.74	0.00
Kab Magelang	2018	0.14	26.51	27.97	28.78	0.01
	2019	0.16	26.76	28.00	28.82	0.00
	2020	0.14	26.52	27.92	28.86	0.01
	2021	0.15	26.65	27.95	28.91	0.01
	2017	0.16	26.83	28.16	29.42	0.00
Kab Pati	2018	0.16	26.67	27.88	29.45	0.00
	2019	0.13	26.62	28.12	29.48	0.00
	2020	0.14	26.64	28.04	29.46	0.00
	2021	0.14	26.69	28.05	29.48	0.01
	2017	0.15	26.44	27.88	28.54	0.01
Kab Pekalongan	2018	0.15	26.46	27.88	28.65	0.01
	2019	0.16	26.56	27.91	28.74	0.01
	2020	0.17	26.56	27.82	28.75	0.02
	2021	0.17	26.57	27.82	28.78	0.01
	2017	0.18	26.60	27.85	28.51	0.02
Kab Purbalingga	2018	0.15	26.37	27.85	28.59	0.01
	2019	0.15	26.45	27.87	28.68	0.01
	2020	0.17	26.53	27.77	28.65	0.01
	2021	0.18	26.66	27.80	28.68	0.01
	2017	0.14	26.42	27.82	28.58	0.00
Kab Purworejo	2018	0.14	26.38	27.85	28.65	0.01
	2019	0.13	26.36	27.89	28.73	0.01
	2020	0.14	26.44	27.83	28.77	0.01
	2021	0.19	26.81	27.87	28.83	0.01
	2017	0.17	26.43	27.56	28.16	0.02
Kab Rembang	2018	0.17	26.42	27.53	28.37	0.03
	2019	0.17	26.45	27.68	28.39	0.03
	2020	0.17	26.51	27.64	28.48	0.02
	2021	0.21	26.72	27.66	28.55	0.01
	2017	0.20	26.76	27.88	28.77	0.01
Kab Semarang	2018	0.18	26.67	27.90	29.11	0.01

Kabupaten	Tahun	KK	LN_PAD	LN_DP	LN_Total	LEV
		Y	X1	X2	Aset X3	X4
	2019	0.19	26.78	27.93	29.18	0.01
	2020	0.20	26.82	27.85	29.22	0.01
	2021	0.24	27.08	27.87	29.30	0.01
Kab Sragen	2017	0.18	26.73	27.97	28.70	0.01
	2018	0.15	26.54	27.96	28.85	0.07
	2019	0.16	26.63	27.99	29.00	0.03
	2020	0.18	26.70	27.93	29.04	0.01
	2021	0.23	27.01	27.91	29.07	0.01
Kab Sukoharjo	2017	0.23	26.86	27.83	29.14	0.00
	2018	0.21	26.80	27.83	29.19	0.00
	2019	0.21	26.85	27.85	29.28	0.00
	2020	0.23	26.88	27.78	29.37	0.00
	2021	0.25	26.99	27.77	29.47	0.01
Kab Tegal	2017	0.15	26.65	28.04	28.73	0.01
	2018	0.15	26.64	28.05	28.79	0.01
	2019	0.16	26.80	28.09	28.85	0.01
	2020	0.17	26.81	28.02	28.91	0.01
	2021	0.21	27.11	28.06	28.97	0.01
Kab Temanggung	2017	0.17	26.45	27.71	28.71	0.04
	2018	0.15	26.25	27.70	28.76	0.02
	2019	0.15	26.35	27.76	28.81	0.02
	2020	0.17	26.45	27.68	28.79	0.01
	2021	0.18	26.62	27.75	28.86	0.02
Kab Wonogiri	2017	0.14	26.53	28.05	28.79	0.01
	2018	0.11	26.32	28.06	28.87	0.02
	2019	0.12	26.38	28.10	28.95	0.01
	2020	0.12	26.34	28.00	28.97	0.01
	2021	0.10	26.21	28.03	29.00	0.01
Kab Wonosobo	2017	0.12	26.15	27.76	28.62	0.01
	2018	0.12	26.15	27.76	28.75	0.04
	2019	0.12	26.20	27.84	28.85	0.03
	2020	0.13	26.25	27.75	28.87	0.06
	2021	0.17	26.55	27.77	28.96	0.17
Kota Magelang	2017	0.26	26.18	27.04	28.91	0.00
	2018	0.28	26.24	27.07	28.98	0.00
	2019	0.28	26.33	27.08	29.02	0.00

Kabupaten	Tahun	KK	LN_PAD	LN_DP	LN_Total	LEV
		Y	X1	X2	Aset	X3
	2020	0.31	26.40	26.99	29.06	0.00
	2021	0.32	26.49	27.00	29.10	0.00
Kota Pekalongan	2017	0.21	25.98	27.10	28.47	0.01
	2018	0.20	25.91	27.10	28.53	0.01
	2019	0.22	26.08	27.14	28.68	0.01
	2020	0.24	26.16	27.06	28.70	0.01
	2021	0.26	26.25	27.13	28.75	0.01
Kota Salatiga	2017	0.25	26.12	27.11	28.74	0.00
	2018	0.23	26.07	27.51	28.77	0.01
	2019	0.25	26.19	27.07	28.75	0.01
	2020	0.25	26.11	26.98	28.77	0.01
	2021	0.30	26.36	27.00	28.79	0.01
Kota Semarang	2017	0.45	28.21	27.99	31.03	0.00
	2018	0.43	28.23	27.99	31.06	0.00
	2019	0.44	28.33	28.18	30.53	0.00
	2020	0.46	28.34	28.14	30.68	0.01
	2021	0.49	28.50	28.16	30.70	0.01
Kota Tegal	2017	0.30	26.45	27.19	28.45	0.01
	2018	0.28	26.34	27.12	28.51	0.02
	2019	0.28	26.38	27.19	28.51	0.01
	2020	0.26	26.31	27.16	28.51	0.02
	2021	0.30	26.45	27.12	28.53	0.03

Lampiran 9 Hasil uji analisis statistik deskriptif

	Y_KK	X1_PAD	X2_DP	X3_SIZE	X4_LEV
Mean	0.184485	26.63624	27.84121	28.99279	0.012788
Median	0.170000	26.58000	27.89000	28.91000	0.010000
Maximum	0.490000	28.50000	28.29000	31.06000	0.170000
Minimum	0.100000	25.91000	26.98000	28.16000	0.000000
Std. Dev.	0.065615	0.409125	0.315697	0.435135	0.016986
Skewness	2.306843	2.069307	-1.350096	2.186156	5.676667
Kurtosis	9.784442	9.722687	4.311843	10.38831	48.02263
Jarque-Bera Probability	462.7888 0.000000	428.4682 0.000000	61.95730 0.000000	506.7166 0.000000	14822.05 0.000000
Sum	30.44000	4394.980	4593.800	4783.810	2.110000
Sum Sq. Dev.	0.706081	27.45087	16.34496	31.05212	0.047318
Observations	165	165	165	165	165

Lampiran 10 Hasil uji model regresi

1. Common Effect Model (CEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/12/23 Time: 21:25
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1_PAD	0.159707	0.005110	31.25264	0.0000
X2_DP	-0.186535	0.004252	-43.86488	0.0000
X3_SIZE	0.012266	0.004515	2.716907	0.0073
X4_LEV	-0.026898	0.068902	-0.390384	0.6968
C	0.768571	0.109239	7.035704	0.0000
R-squared	0.951495	Mean dependent var	0.184485	
Adjusted R-squared	0.950282	S.D. dependent var	0.065615	
S.E. of regression	0.014631	Akaike info criterion	-5.581569	
Sum squared resid	0.034249	Schwarz criterion	-5.487450	
Log likelihood	465.4795	Hannan-Quinn criter.	-5.543363	
F-statistic	784.6519	Durbin-Watson stat	0.861903	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/16/23 Time: 15:08
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.540683	0.284974	-5.406392	0.0000
X1_PAD	0.143895	0.004168	34.52790	0.0000
X2_DP	-0.060975	0.008626	-7.068500	0.0000
X3_SIZE	-0.014146	0.004284	-3.301654	0.0012
X4_LEV	0.006913	0.037640	0.183663	0.8546

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Random Effect Model

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 05/12/23 Time: 11:49

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.149978	0.156642	0.957457	0.3398
X1_PAD	0.144873	0.003756	38.56673	0.0000
X2_DP	-0.130789	0.005249	-24.91673	0.0000
X3_SIZE	-0.006307	0.003660	-1.722953	0.0868
X4_LEV	-0.015364	0.036562	-0.420225	0.6749
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.010974	0.7802
Idiosyncratic random			0.005826	0.2198
Weighted Statistics				
R-squared	0.877566	Mean dependent var		0.042612
Adjusted R-squared	0.874505	S.D. dependent var		0.023089
S.E. of regression	0.008179	Sum squared resid		0.010704
F-statistic	286.7062	Durbin-Watson stat		1.381514
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.888499	Mean dependent var		0.184485
Sum squared resid	0.078728	Durbin-Watson stat		0.187832

Lampiran 11 Hasil uji kesesuaian model

1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM2

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.536292	(32,128)	0.0000
Cross-section Chi-square	340.699365	32	0.0000

2. Uji Hausman

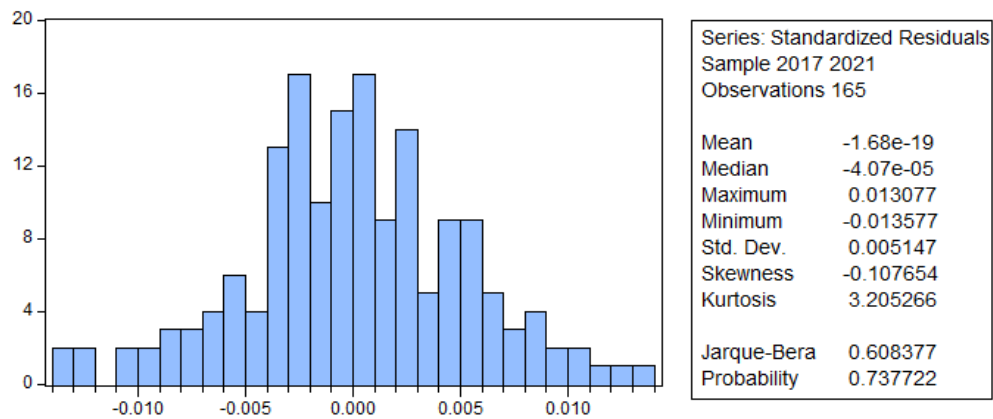
Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	159.400213	4	0.0000

Lampiran 12 Hasil uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas**2. Uji Multikolonieritas**

	X1_PAD	X2_DP	X3_SIZE	X4_LEV
X1_PAD	1.000000	0.519350	0.805912	-0.105617
X2_DP	0.519350	1.000000	0.385704	0.008690
X3_SIZE	0.805912	0.385704	1.000000	-0.191051
X4_LEV	-0.105617	0.008690	-0.191051	1.000000

3. Uji Heteroskedastisitas

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 05/16/23 Time: 13:30
Sample: 1 165
Included observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.078693	0.073991	-1.063545	0.2891
X1_PAD	0.002647	0.003458	0.765619	0.4450
X2_DP	-0.003314	0.002877	-1.151614	0.2512
X3_SIZE	0.003835	0.003050	1.257241	0.2105
X4_LEV	-0.001535	0.048661	-0.031554	0.9749

4. Uji Autokorelasi

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 13 Hasil uji ketepatan model

1. Uji F

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

2. Uji koefisien Determinasi

R-squared	0.993848	Mean dependent var	0.184485
Adjusted R-squared	0.992117	S.D. dependent var	0.065615
S.E. of regression	0.005826	Akaike info criterion	-7.258535
Sum squared resid	0.004344	Schwarz criterion	-6.562050
Log likelihood	635.8291	Hannan-Quinn criter.	-6.975808
F-statistic	574.3658	Durbin-Watson stat	2.047011
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji Hipotesis

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 05/16/23 Time: 13:02

Sample: 2017 2021

Periods included: 5

Cross-sections included: 33

Total panel (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.540683	0.284974	-5.406392	0.0000
X1_PAD	0.143895	0.004168	34.52790	0.0000
X2_DP	-0.060975	0.008626	-7.068500	0.0000
X3_SIZE	-0.014146	0.004284	-3.301654	0.0012
X4_LEV	0.006913	0.037640	0.183663	0.8546

Cek Plagiasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 782336 Fax (0271) 782336 Website: iain-surakarta.ac.id – Email: info@iain-surakarta.ac.id.

SURAT KETERANGAN TURNITIN

Setelah melakukan tes uji *similarity*, menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alivia Salma Diva
 NIM : 195221298
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah
 Paper ID : 2128878262
 Date : 10 Juli 2023
 Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 27%

Sukoharjo, 10 Juli 2023

 Farah Mifawati, S.Sos.I
 NIK. 198906072018102003

LAMPIRAN

Source	27%	27%	16%	17%
appdx.com/turnitin/				20%
digipolis.com/				1%
www.pdf				1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%
https://www.kemendagri.go.id/				<1%

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama : Alivia Salma Diva
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 06 April 2001
Janis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kalioso RT 04/RW 01, Kalijambe, Sragen
Agama : Islam
Nomor Telepon : 083134316156
Email : aliviasalma9496@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. TK Aisyiyah VI Cengklik, Jetiskarangpung, Kalijambe, Sragen
2. MI Yaumika Kalioso, Jetiskarangpung, Kalijambe, Sragen
3. SMP Negeri 1 Kalijambe, Sragen
4. SMA Negeri Gondangrejo Karanganyar
5. UIN Raden Mas Said Surakarta